UPAYA GABUNGAN KELOMPOK TANI DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE AGRICULTURE UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI PANGAN

(Studi Pada Gapoktan Podo Rukun, Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> AYU INDRIADIKA NIM. 155030100111059



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai

kesanggupannya."

- Qs. Al-Baqarah 286-



PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA KEDUA ORANGTUA SAYA DAN SELURUH KELUARGA BESAR, SAHABAT-SAHABAT, DAN SELURUH MASYARAKAT YANG TERLIBAT DAN TERCANTUM DALAM SKRIPSI INI.



BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektikf

Sustainable Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri

Pangan (Studi pada Gapoktan Podo Rukun, Desa Rumpuk,

Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan)

Disusun oleh : Ayu Indriadika

NIM : 155030100111059

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, Juni 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si. NIP. 19700721 200501 2 001 Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP. NIP. 201107860724 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

27 Juni 2019

Pukul

11.00 - 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Ayu Indriadika

Judul

Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Pangan (Studi pada Gapoktan Podo Rukun, Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si.

NIP.197007212005012001

Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP

NIP. 2011078607242001

Anggota Komisi Pembimbing

Ali Maskur, S. AP., M. AP., MA. NIP. 198607162014041001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul "Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan (Studi pada Gapoktan Podo Rukun Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2019

METERAL TEMPEL

6000 6000

> Ayu Indriadika NIM. 155030100111059

RINGKASAN

Ayu Indriadika, 2019, **Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif** Sustainable Agriculture Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Pangan (Studi pada Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan)

Komisi Pembimbing: (1) Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si. (2) Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP.

Pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini diarahkan pada pertanian yang berkelanjutan atau *Sustainable Agriculture*. Jawa Timur merupakan provinsi dengan penyumbang tanaman pangan terbesar di Indonesia, salah satu kabupaten yang menjadi lumbung pangannya adalah kabupaten Lamongan. Salah satu upaya pertanian yang berkelanjutan adalah dengan dibentuknya lembaga pertanian yang dapat meningkatkan kemandirian petani dan keberlanjutan pertanian. Bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan pertanain yang kuat dan mandiri adalah dengan dibentuknya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berada di desa-desa di Indonesia. Salah satu Gapoktan yang ada di kabupaten Lamongan adalah Gapoktan "Podo Rukun" yang berada di desa Rumpuk, kecamatan Mantup, dimana desa ini menjadi salah satu desa dengan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan memiliki lahan pertanian yang luas, selain itu masayarakat desa Rumpuk sudah mandiri dalam menyukupi kebutuhan pangan mereka. Oleh karena itu upaya Gapoktan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di desa Rumpuk perlu dilihat.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal itu bertujuan untuk mendeskripsikan upaya gabungan kelompok tani Podo Rukun dalam pertanian berkelanjutan pada desa Rumpuk dalam teori pertanian berlanjutan menurut Munasinghe (1993) yang terdiri dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan serta faktor pendukung dan penghambat untuk mengetahui bagaimana upaya Gapoktan Podo Rukun dalam Pertanian Berkelanjutan pada desa Rumpuk. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles Hubberman dan Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Gapoktan Podo Rukun dalam pertanian berkelanjutan sudah optimal. Hal tersebut didasari dengan terpenuhinya tiga dimensi yang diajukan peneliti pada fokus penelitian yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun sejalan dengan itu masih terdapat beberapa kekurangn yang menghambat dalam upaya pertanian berkelanjutan, maka dari itu pemerintah, Gapoktan, dan masyarakat perlu meningkatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam upaya pertanian berkelanjutan di desa Rumpuk, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan.

Kata kunci: Gabungan Kelompok Tani, Pertanian, Berkelanjutan

SUMMARY

Ayu Indriadika, 2019, **The Effort of Farmer Group in Sustainable Agriculture Perspective to Realizing The Independent Food Village (Study at Gapoktan Podo Rukun, Rumpuk Village, Mantup Sub-district, Lamongan Regency)** Advisory Commission: (1) Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si. (2) Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP.

Nowadays, the development of agriculture in Indonesia is directed into sustainable agriculture. East Java is the largest food crops contributor in Indonesia, one of regencies that being food barn is Lamongan Regency. One of sustainable agriculture efforts is the establishment of agricultural institution that can increase the independence of farmers and the sustainability of agriculture. The kind of government's effort to establish a strong and independent agriculture is the establishment of Famer Group (Gapoktan) that located in the villages in Indonesia. One of Gapoktan in Lamongan Regency is Gapoktan "Podo Rukun" which located in Rumpuk Village, Mantup Sub-district, where this village is one of village with the majority of population living as farmer and having large agricultural land, moreover the society in Rumpuk Village has been independent in fulfilling their food needs. Therefore the effort of Gapoktan in realizing the sustainable agriculture in Rumpuk Village should to be studied.

This study was descriptive research with qualitative approach, this method aimed to describe the effort of farmer group of Podo Rukun in sustainable agriculture in Rumpuk Village in Munasinghe's theory (1993) about sustainable agriculture that consisted of economy dimension, social dimension, environment dimension and also the supporting and inhibiting factors to understand about the effort of Gapoktan Podo Rukun in sustainable agriculture in Rumpuk Village. Data source that used was primary and secondary data. Data collection technique that conducted in this study was observation, interview, and documentation. Research instrument consisted of the researcher, interview guidelines, and documentation. Data was analyzed referred to the method that explained by Miles Hubberman and Saldana.

Based on the study result, the effort of Gapoktan Podo Rukun in sustainable agriculture had been optimal. This based on three dimensions of research focus which were economy dimension, social dimension, environment dimension that had been fulfilled. However, there were several inhibiting factors in the effort of sustainable agriculture, therefore the government, Gapoktan, and society should improve the existed obstacle to obtain the optimal result in the effort of sustainable agriculture in Rumpuk Village, Mantup Sub-district, Lamongan Regency.

Keywords: Farmer Group, Agriculture, Sustainable

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk dan nikmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan karya sebagai rangkaian tugas terkahir dalam proses perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana. Dalam skripsi ini, penulis mengambil judul "Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Sustainable Agriculture (Studi pada desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan). Penulis mengambil tema dan judul di atas sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dari hasil kajian dan penelitian yang telah dijalani.

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis banyak mendapatkan dukungan secara moril, masukan, saran, maupun sarana diskusi. Oleh karena itu, pada kesempatan iini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Admiinistrasi Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

- 3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. selaku Ketua Program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
- 4. Ibu Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si. yang selama ini menjadi pembimbing dalam berdiskusi terkait skripsi sekaligus orang tua kedua penulis.
- 5. Ibu Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP. yang telah membimbing penulis dengan sabar dan teliti sekaligus menjadi teman berdiskusi dalam menyelesaikan skripsi.
- 6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi terutama program studi Ilmu Administrasi Publik yang telah mengajar sekaligus mendidik penulis selama masa perkuliahan.
- 7. Ibu, Ayah, dan Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk kelancaran pembuatan skripsi ini.
- 8. Bapak Sukadi, SP., MM. selaku Kepala Bidang PSDM Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan yang bersedia memberi masukan dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
- Bapak Agus Sutikno, SP. MP. selaku Petugas Penyuluh Lapangan desa Rumpuk yang telah menemani dan membimbing penulis selama melakukan penelitian di desa Rumpuk.
- Aichi dan Jo yang bersedia mengantar, menemani dan mendokumentasikan proses penelitian.

- 11. Teman-teman baik dan terdekat penulis, Nizam, Ocha, Saski, Yulfa, yang memberikan bantuan, motivasi, dan doanya untuk kelancaran skripsi penulis.
- 12. Teman-teman baik penulis saat mengerjakan skripsi Ikhrisa, Berlian, Ai, Adhe Rizal, Ardy, Bayu, Dicky, Fizai, Rian, Nabila, Kentong, Galih, Rara yang memberikan semangat saat begadang dan bantuan saat proses mengerjakan skripsi.
- 13. Teman-teman seperbimbingan yang selalu memberikan informasi dan bantuan kepada penulis, Herdi, Ngayomi, Difta, Redo, dkk semua.
- 14. Teman-teman sejak SMP, Rumpita: Ade, Fifi, Ulik, Titi, Dewi, Sherly, Lia yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
- 15. Teman jauh penulis Lindri, Zharfan, Karllie, Nyinyin, Indah, yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
- 16. Pakdhe, Budhe, Mbak Agrey dan Mas Reveyn atas fasilitas selama tinggal di Malang dan kelancaran skripsi penulis.
- Serta teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2015 atas dukungan dan motivasinya.

Penulis sadar bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaikikualitas karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Malang, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO
LEMBAR PERSEMBAHAN
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
RINGKASAN
SUMMARY
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah.
C. Tujuan Penelitian
D. Kontribusi Penelitian
E. Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
B. Administrasi Pembangunan
1. Konsep Pembangunan
2. Pembangunan Pertanjan
C. Pembangunan Berkelanjutan
1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan
2. Sustainable Agriculture
D. Kelembagaan Petani
1. Konsep Kelembagaan Petani
2. Arti Penting Kelembagaan Petani
3. Gabungan Kelompok Tani
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Fokus Penelitian
C. Lokasi dan Situs Penelitian
D. Sumber dan Jenis Data
E. Teknik Pengumpulan Data
F. Instrumen Penelitian

G. Analisis Data
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan
a. Aspek Geografis
b. Potensi Pengembangan Wilayah
c. Kondisi Demografi
2. Gambaran Umum Situs Penelitian
a. Aspek Geografis Desa Rumpuk
b. Aspek Demografis Desa Rumpuk
c. Potensi Desa Rumpuk
d. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Gapoktan Podo Rukun
B. Penyajian Data
1. Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable
Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan
a. Dimensi Ekonomi
b. Dimensi Sosial
c. Dimensi Lingkungan
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Gabungan
Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk
mewujudkan Desa Mandiri Pangan
a. Rekruitmen
b. Sarana
c. Jejaring Kemitraan
C. Analisis dan Pembahasan
1. Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif <i>Sustainable</i>
Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan
a. Dimensi Ekonomi
b. Dimensi Sosial
c. Dimensi Lingkungan
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Gabungan
Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk
1 0
mewujudkan Desa Mandiri Pangana. Rekruitmen
b. Sarana
c. Jejaring Kemitraan
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
I AMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Profesi di	
Kabupaten Lamongan tahun 2016	5
Tabel 2.1. Perbedaan Karakteristik Konsep Administrasi Publik	
dan Administrasi Pembangunan	15
Tabel 4.1.Pemanfaatan Tanah Kabupaten Lamongan tahun 2011	50
Tabel 4.2. Data Pendidikan Masyarakat desa Rumpuk	55
Tabel 4.3. Jenis Pekerjaan masyarakat desa Rumpuk	56
Tabel 4.4. Potensi Agribisnis desa Rumpuk	57
Tabel 4.5. Jabatan dan Uraian Tugas Pengurus Gapoktan Podo	
Rukun	59
Tabel 4.6. Pemakaian Pupuk di pertanian Desa Rumpuk	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka segitiga konsep pembangunan	
berkelanjutan	23
Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan	
Saldana	45
Gambar 4.1. Peta Kabupaten Lamongan	46
Gambar 4.2. Peta Desa Rumpuk	54
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Gapoktan Podo Rukun	58
Gambar 4.4. Catatan simpan pinjam Gapoktan Podo Rukun	62
Gambar 4.5. Partisipasi masyarakat desa Rumpuk	64
Gambar 4.6. Piala Juara Lumbung Pangan Kabupaten Lamongan	65
Gambar 4.7. Piala prestasi Gapoktan Podo Rukun	65
Gambar 4.8. kegiatan di UPT Dinas Pertanian Kec. Mantup	68
Gambar 4.9. Pembinaan oleh PPL desa Rumpuk	69
Gambar 4.10. Pembukuan Gapoktan Podo Rukun	70
Gambar 4.11. Tanah Pertanian di desa Rumpuk	73
Gambar 4.12. Pengisisan Lumbung desa Rumpuk	80
Gambar 4.13. Penimbangan Hasil Panen	80
Gambar 4.14. Alur Pengajuan permintaan sarana melalui	
Musrenbangdes	99

BRAWIJAY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 2. Pedoman wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi penelitian

Lampiran 4. Akta Badan Hukum Gapoktan Podo Rukun

Lampiran 5. Daftar Anggota Gapoktan Podo Rukun

Lampiran 6. Curriculum Vitae



BRAWIJAYA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan berada di wilayah yang beriklim tropis sehingga kegiatan bercocok tanam pun dapat dilakukan sepanjang tahun. Kondisi alam demikian menguntungkan bagi negara Indonesia terutama sektor pertanian dan membuat sektor pertanian menjadi penyumbang peningkatan devisa yang nyata. Pada tahun 2017, sektor pertanian menjadi sektor terbesar nomor dua yang berpengaruh besar dalam peningkatan perekonomian negara. Dikutip dari laman berita finance.detik.com (2017) menurut data dari Badan Pusat Statistik, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sebanyak pada triwulan-I 2017 kontribusinya 13,59%, triwulan II-2017 sebanyak 13,92%.

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa pembangunan pada sektor pertanian dianggap penting karena kontribusinya terhadap PDB nasional. Menurut Gillis, dkk (1992), beberapa peranan penting sektor pertanian dalam meningkatkan perekonomian suatu negara adalah 1) sebagai penyedia pangan, 2) sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor perekonomian lain, 3) sebagai sumber kapital bagi pertumbukan ekonomi modern khususnya dalam tahap awal pembangunan, 4) sumber devisa, dan 5) masyarakat pedesaan merupakan pasar dari produk yang dihasilkan dari sektor industri di perkotaan.

Menurut World Bank (2010) beberapa tantangan sektor pertanian di Indonesia berfokus pada 1) pendapatan petani 2) peningkatan produktifitas petani 3) dana yang diperlukan petani 4) integritas infrastuktur 5) regulasi dari pemerintah. Selain itu keberlanjutan pertanian menurut Juarini (2015) juga sangat tergantung pada sumber daya manusia pertanian. Beberapa kendala dan masalah lain yang dihadapi pertanian adalah 1) rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya tingkat kemiskinan petani; 2) lahan pertanian yang semakin menyempit; 3) terbatasnya akses ke sumber daya produktif, terutama akses terhadap sumber permodalan yang diiringi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia; 4) penguasaan teknologi masih rendah serta, 5) lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) di sektor pertanian dan pedesaan pada umumnya (Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 20015-2019).

Menururt Rivai (2011) pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*), sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan pertanian (termasuk pembangunan perdesaan) yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan disemua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian. Dari penjelasan mengenai berbagai hambatan di atas, dalam pembangunan pertanian diperlukan sebuah peranan kelembagaan pertanian untuk membantu sektor pertanian menciptakan pertanian jangka panjang dengan produktivitas terus-menerus sehingga dapat mewujudkan misi dari RPJM

Nasional tahun 2015-2019 Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan sehingga dapat menciptakan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Anantanyu (2009) dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, proses produksi, sampai dengan pengolahan hasil diperlukan kelembagaan petani. Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Menurut Dimyati (2007), beberapa hambatan pada kelembagaan petani di Indonesia adalah 1) minimnya wawasan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran, 2) belum terlibatnya petani secara utuh dalam kegiatan agribisnis 3) peran dan fungsi kelembagaan petani belum berjalan secara optimal. Sehingga, kelembagaan petani yang diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan masih belum berfungsi optimal.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 69 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan petani tersebut diantaranya adalah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kelembagaan petani diharapkan mampu mengatasi persoalan para petani yang terorganisir dalam kelembagaan tersebut. Salah satu kelembagaan petani yang bertugas sebagai lembaga penjembatan yang menjadi penghubung petani satu desa

BRAWIJAYA

dengan lembaga-lembaga lain di luarnya adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2013 pasal 1 ayat 11, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 82 tahun 2013 tetang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dijelaskan bahwa Gabungan Kelompok Tani merupakan lembaga yang berfungsi untuk pemenuhan sarana dan prasarana produksi, unit produksi komoditas, unit pengolahan, unit pemasaran dan unit usaha keuangan makro. Gapoktan dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pertanian dimulai dari permodalan hingga pengolahan hasil pertanian. Diharapkan dengan digabungkannya beberapa kelompok tani dalam satu Gapoktan akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan dan mandiri. Gabungan Kelompok Tani yang disingkat menjadi Gapoktan, pengembangannya telah menyebar ke seluruh daerah di semua provinsi di Indonesia. Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian pertanggal 26 November 2018, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mengalami peningkatan sebanyak 68,6%. Data yang diperoleh yaitu, 37.632 jumlah Gapoktan di tahun 2014 menjadi 63.435 pada tahun 2018.

Namun menurut Nasrul (2012:168-169) kelembagaan petani umumnya tidak berjalan dengan baik salah satunya disebabkan karena partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini

BRAWIJAY

tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah. Selain masalah internal petani tersebut, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar.

Berdasarkan mediaindonesia.com (2018) Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten yang menjadi lumbung pangan di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas lahan panen padi seluas 21.184 hektar pada akhir tahun 2017 sampai Februari 2018 yang tersebar di 23 kecamatan yang mana hasil total produksinya b mencapai 146.467 ton. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Lamongan mencapai 1.354.119 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani adalah sebanyak 301.410 orang.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Profesi di Kabupaten Lamongan tahun 2016

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12.254
Wiraswasta	263.471
Petani/Pekebun	301.410
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12.254
Nelayan/Perikanan	14.036

Sumber: olahan penulis dari data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Lamongan, 2016

Dari data tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat Lamongan menggantungkan hidupnya dengan bertani sebanyak 22,26% penduduk dengan profesi petani yang merupakan profesi dengan jumlah terbanyak dibanding profesi lainnya. Berdasarkan Surat Ketetapan Bupati no. 188 tahun 2018, jumlah

Gapoktan yang telah disahkan di Lamongan sendiri terdapat 469 Gapoktan yang tersebar pada 27 kecamatan. Dengan demikian Gapoktan yang tersebar di desa-desa Kabupaten Lamongan tersebut ditujukan untuk memfasilitasi dan menunjang produktifitas pertanian.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2018, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani di wilayah Kabupaten Lamongan, serta untuk memfasilitasi kelembagaan petani merupakan wujud perhatian pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap sektor pertaniannya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian No. 82 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, tentang wewenang pemerintah daerah untuk membantu mendorong mewujudkan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri (Surat Keputusan Bupati Nomor 188 Tahun 2018).

Meskipun pertanian di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan berhasil, namun terdapat beberapa masalah yang berpengaruh. Salah satunya yaitu penyalahgunaan dana Pengembangan Usaha Agribis Pedesaan (PUAP) untuk kepentingan pribadi. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 tahun 2008, Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Dalam kasus ini, yang disampaikan oleh anggota Polres Kabupaten Lamongan pada tahun 2011 Gapoktan Margi Jaya desa Bulumargi, Kecamatan Babat, mendapatkan bantuan program PUAP sebesar Rp 100.000.000,- dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk pinjaman pupuk, namun setelah disetor ke Bank, uang

tersebut ditarik kembali oleh ketua Gapoktan tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi (bangsaonline.com, 2018). Selain itu masalah yang sering terjadi pada petani di Kabupaten Lamongan adalah rendahnya produksi petani di lahan sendiri sehingga perlu ditingkatkannya pengetahuan dan modal petani untuk mengelola lahannya (Kepala Bidang PSDM, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kab. Lamongan, 2018).

Salah satu Gapoktan di Kabupaten Lamongan yang menarik untuk diteliti terkait upaya dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah Gapoktan "Podo Rukun" yang berada di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan dimana desa Rumpuk adalah desa dengan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian tadah hujan. Gapoktan "Podo Rukun" yang telah terbentuk sejak tahun 2008 dan berbadan hukum sejak 2015, merupakan salah satu kelembagaan petani yang berhasil memperoleh dan menjalankan program pengelolaan dana PUAP, memanfaatkan dan mengembangkan dana tersebut, serta mandiri dalam laporan pertanggungjawabannya. Gapoktan Podo Rukun berada di desa Rumpuk yang merupakan desa Mandiri Pangan dan Bioenergi.

Berdasarkan pada uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk Mewujudkan Desa Mandiri Pangan (Studi Pada Gapoktan Podo Rukun, Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan). Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya Gabungan Kelompok Tani "Podo Rukun" desa Rumpuk serta hal-hal apa saja yang dapat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable**Agriculture* untuk mewujudkan desa mandiri pangan?
- 2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pada upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan desa mandiri pangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

- Mendeskripsikan dan menganalisa upaya Gabungan Kelompok Tani dalam
 Perspektif Sustainable Agriculture untuk mewujudkan desa mandiri pangan
- 2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan penghambat pada upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan desa mandiri pangan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik, maupun secara praktis yang meliputi kontribusi teoritis dan kontribusi

1. Kontribusi Teoritis

- a. Memberikan bahan literasi yang lebih mendalam dalam pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam kajian tentang upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk mewujudkan desa mandiri pangan.
- b. Sebagai wacana ilmiah dan bahan bagi peneliti lain yang mengkaji upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan desa mandiri pangan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan analisis mengenai upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan desa mandiri pangan .
- b. Selain itu, menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan desa mandiri pangan
- c. Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, yaituupaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk mewujudkan desa mandiri pangan

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disajikan ke dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab memberikan pokok bahasan yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis. Dalam sistematika penulisan ini memuat BAB I (pendahuluan), BAB II (Kajian Pustaka), BAB III (Metodologi Penelitian), BAB IV (Hasil dan Pembahasan), dan BAB V (Penutup) yang dijelaskan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan penjabaran mengenai latar belakang dimana terdapat rumusan masalah berupa bagaimanakah upaya Gabungan Kelompok Tani dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat upaya Gabungan Kelompok Tani dalam *Sustainable Agriculture*. Tujuan penelitian berisi hal-hal yang akan dicari dan dikemukakan dalam penelitian secara teoritis maupun praktis. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat isi dari bab-bab yang dibahas selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori dan landasan pemikiran yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Teori-teori yang dipakai yaitu administrasi publik, administrasi pembangunan, pembangunan pertanian, pembangunan berkelanjutan, pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*), dan kelembagaan

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penjabaran mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Terdiri dari jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif, fokus penelitian yang meliputi upaya Gabungan Kelompok Tani dalam *Sustainable Agriculture* serta faktor pendukung dan penghambat upaya Gabungan Kelompok Tani dalam *Sustainable Agriculture*, lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Lamongan dan situs penelitian di Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun desa Rumpuk, kecamatan Mantup, lalu dijabarkan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data menggunakan metode Miles Hubberman dan Saldana.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang menyajikan data-data dari situs penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih sesuai tema penelitian. Hasil penelitian dianalisis menurut teori pembangunan pertanian berkelanjutan oleh Munasinghe (1993) yang membagi menjadi beberapa dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

BRAWIJAYA

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan hasil penyajian data lapangan dan analisa teoritik dari penulis, serta saran - saran dari peneliti yang dapat digunakan sebagai masukan upaya Gabungan Kelompok Tani dalam *Sustainable Agriculture*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Dalam kegiatan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari Administrasi. Administrasi memiliki peran penting untuk mencapai suatu tujuan. Definisi dari administrasi itu sendiri memiliki arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan cara sistematis dalam penyusunan dan pencatatan dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi untuk kepentingan intern atau ekstern (Siagian, 2006:5). Menurut Handayaningrat administrasi dalam arti sempit, yaitu dari kata Admnistratie yang berasal dari bahasa Belanda, memiliki arti yaitu meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan atau disebut dengan clerical work (Handayaningrat, 1995:2). Sehingga secara singkatnya, menurut dua pengertian oleh para ahli di atas dalam arti sempit, adminitrasi adalah kegiatan catat-mencatat untuk menyediakan informasi dalam aktivitas organisasi untuk kepentingan internal maupun eksternal.

Sedangkan secara luas, administrasi publik menurut Siagian, mendefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Siagian, 2006:3). Sedangkan menurut Herbert A. Simon dikutip

Sedangkan menurut Listyaningsih (2014), administrasi publik berfungsi sebagai pelaksana kebijakan negara dan fokus pada pekerjaan rutin misalnya pelayanan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, di negara berkembang sangat dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat berfungsi sebagai perumus kebijakan sekaligus pelaksananya. Penyelenggara negara juga dituntut dapat menjadi agen perubahan arah yang lebih baik, sehingga tujuan pembangunan dapat terwujud. Menghadapi bahwa realitas di negara berkembang terdapat masalah yang sangat kompleks maka administrator dalam hal ini adalah pemerintah harus bisa menjadi agen pembaharu yang bersifat *problem solving* (Listyaningsih, 2014:11-13).

Pemerintah dalam melaksanakan tugas memiliki suatu tujuan yang pasti yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah yaitu melalui pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah melainkan perlu adanya peran serta dari masyarakat dan swasta sebagai penerima dampak dari pembangunan. Sebab itulah muncul administrasi pembangunan.

AWIJAYA

B. Administrasi Pembangunan

1. Konsep Administrasi Pembangunan

Definisi administrasi pembangunan dibagi menjadi 2 cakupan yaitu administrasi dan pembangunan. Sejalan dengan pendapat Siagian (2016:) menjabarkan pengertian Administrasi Pembangunan sebagai berikut:

"Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)."

Kemudian Siagian (2016) menarik batasan-batasan pengertian atau definisi kerja dari Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersanagkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Pembangunan pada umumnya dapat diartikan sebagai proses atau usaha-usaha untuk mencapai suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konsep administrasi pembangunan dapat dikatakan memiliki karakteristik yang lebih maju jika disandingkan dengan konsep administrasi publik. Sesuai dengan Mindarti (2016:132) yang menyatakan bahwa konsep administrasi pembangunan memiliki ciri lebih maju dibandingkan ciri administrasi publik. Perbedaan dasar antar kedua konsep ini secara ringkas dapat disarikan pada tabel berikut:

BRAWIJAYA

Tabel 2.1: Perbedaan Karakteristik Konsep Administrasi Publik dan Administrasi Pembangunan

	Tummistrasi i embanganan		
No	Administrasi Publik	Administrasi Pembangunan	
1.	Lebih banyak terkait lingkungan	Lebih menaruh perhatian pada	
	negara maju	lingkungan berbeda khususnya	
		negara berkembang	
2.	Bersikap netral terhadap tujuan	Berperan aktif dan berkepentingan	
	pembangunan	terhadap tujuan pembangunan	
3.	Lebih menekankan pada tertib	Lebih menekankan perubahan ke	
	administrasi dan orientasi masa kini	arah lebih baik dan berorientasi ke	
		masa depan	
4.	Lebih menekankan ke tugas rutin	Lebih berorientasi pada tugas	
		pembangunan (agent of	
		development)	
5.	Lebih mengutamakan kerapian	Lebih mengaitkan kebijakan dan	
	aparatur administrasi itu sendiri	pelaksanaan pembangunan dengan	
	// ,2-	aspek lingkungan	
6.	Terkesan aparatur lebih sebagai	Aparatur lebih sebagai agent of	
	pelaksana	change (penggerak perubahan)	
7.	Lebih berpendekatan legalistik	Lebih berpendekatan lingkungan,	
		berorientasi pada tindakan(action)	
	人 一 发展 人	dan problem solving	

Sumber: Buku Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik oleh Lely Indah Mindarti, 2016.

Administrasi pembangunan pada dasarnya adalah administrasi publik yang "commit" terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan atau dengan kata lain administrasi publik yang lebih ditujukan untuk mendukung proses pembangunan (Haryono dkk, 2012:32). Dengan demikian ruang lingkup administrasi pembangunan adalah penyempurnaan administrasi negara dan penyempurnaan administrasi bagi penyelenggara proses pembangunan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Weider (1962) sebagai berikut:

[&]quot;Development Administration: public adminitration with a special purpose. Administration with the objective of political, economic and social development. Development administrations is the process of guiding an organizing to ward

Ruang lingkup adminsitrasi pembangunan diatas dengan jelas mengatakan pembangunan mempunyai bahwa administrasi kaitan dengan erat administrasi publik, bahkan administrasi pembangunan saling mempengaruhi dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Administrasi pembangunan adalah administrasi publik dapat berperan sebagai "agen of change" yang atau dalam istilah Leemans, disebut sebagai "Management of change" (Haryono dkk, 2012:33). Ciri pokok administrasi pembangunan adalah pendorong proses perubahan atau pembaharuan kearah keadaan yang dianggap lebih baik. Kriteria dasarnya, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah (1985) dalam Haryono, dkk (2012) adalah 1) Pengembangan kapasitas, 2) transfer teknologi, 3) transfer nilai, dan 4) partisipasi termasuk pemerataan. Dimana administrasi pembangunan mencakup penyelenggaraan mulai dari perumusan kebijakan sampai pada implementasinya. Administrasi pembangunan juga memikirkan bagaimana sebuah kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Secara etimologis, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran —an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti: sadar atau siuman (aspek fisiologi); bangkit atau berdiri (aspek perilaku); dalam arti bentuk (aspek anatomi); dan

dalam arti kerja membuat. mendirikan, dan membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk). Konsep pembangunan dianalogikan juga sebagai konsep: pertumbuhan (growth) ,rekonstruksi (reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), perubahan sosial (social change), pembebasan (liberation), pembaruan (innovation), pembangunan bangsa (nation building), pembangunan nasional (national building), pembangunan (development), pengembangan (progress/developing), dan pembinaan (construction) (Suryono A, 2004:26).

Sedangkan Tjokrowinoto (1987) menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut :

- 1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- 2. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- 3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free).
- 4. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental, sebagai *metadiciplinary phenomenom*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
- 5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pemcapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- 6. Pembangunan menjadi cultural specific, situation, dan time specific

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang terencana dan dilakukan secara sadar dimana berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik mengikuti seiring berkembangnya modernitas. Banyak aspek kehidupan yang saat ini membutuhkan sebuah perubahan secara berkelanjutan melalui pembangunan. Sehingga,

Pembangunan yang dilakukan tidak lain adalah untuk proses pencapaian tujuan bangsa dan negara. Pembangunan dapat diterapkan pada semua aspek dan bidang yang membutuhkan adanya pembangunan, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, selama tujuan pembangunan tersebut bersifat mutualisme, saling menguntungkan bagi semua pihak yang bersangkutan serta memajukan kesejahteraan pelaku dari proses pembangunan tersebut. Seperti halnya pembangunan dalam bidang pertanian. Banyak aspek di bidang pertanian yang membutuhkan adanya pembekalan sesuatu yang baru, hal tersebut tidak lain karena adanya tuntutan dari dunia luar dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus diutamakan karena didasarkan pada mayoritas penduduk di Indonesia yang berstatus petani sebagai pekerjaan utama di Indonesia.

2. Pembangunan Pertanian

Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia: (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, (2) Sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia, (3) Pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (4) Pangsa terhadap ekspor nasional cukup besar, (5) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Hanani dkk, 2003) Menurut Uphoff (1989), pembangunan pertanian pada dasarnya meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor yang meliputi teknologi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kelembagaan. Sedangkan menurut Suryana bahwa pertanian yang didukung oleh seperangkat subsistem yaitu input, pengelola proses produksi, pengolahan hasil, dan jasa informasi serta pengaturan. (Suryana dkk, 1990: 120).

Dengan demikian, proses pembangunan pertanian penting adanya untuk berjalan beriringan dengan kelembagaan pertanian karena kedua hal tersebut saling bergantung satu sama lain yang bertujuan untuk menciptakan pertanian yang berkelanjutan, progresif, dan produktifitas tinggi.

Kemudian Mosher dalam Nangameka (2012) menyatakan bahwa terdapat syarat pokok dan syarat penunjang pembangunan pertanian, sebagaimana kutipan berikut:

"Dalam pembangunan pertanian agar dapat mewujudkan harapan petani yang sejahtera membutuhkan 5 syarat pokok yaitu 1)Pasaran untuk hasil usaha tani 2) Teknologi yang selalu berubah 3) Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal 4)Perangsang produksi bagi petani 5)Pengangkutan

Selain kelima sayarat pokok diatas, dalam pembangunan pertanian masih membutuhkan 5 syarat penunjang, yaitu 1)Pendidikan Pembangunan 2) Kredit Produksi 3) Kegiatan Bersama oleh Petani 4) Perbaikan dan Perluasan Tanah Pertanian 5) Perencanaan Pembangunan Pertanian." (Mosher dalam Nangameka, 2012)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan pertanian penting di lakukan di Indonesia yang telah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pembangunan pertanian didasarkan pada beberapa alsan penting untuk pembangunan nasional. Pembangunan pertanian juga terdapat syarat-syarat pokok dan penujang. Persyaratan-persyaratan ini yang akan mempercepat pembangunan pertanian agar cepat mencapai tujuan pembangunan pertanian untuk mensejahterakan petani.

C. Pembangunan Berkelanjutan

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut Kementian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

BRAWIJAY

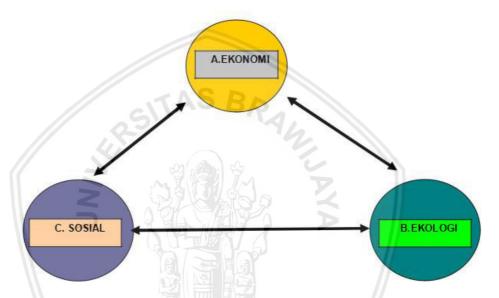
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatiakan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergeneration welfare maximization).

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan

Konsep Sustainable Agriculture atau pertanian berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan usaha ekonomi (profit), keberlanjutan kehidupan sosial manusia (people), dan keberlanjutan ekologi alam (planet). Tiga dimensi tersebut adalah 1) Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang ataupun mendatang. 2) Dimensi sosial, adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. 3) Dimensi

lingkungan alam, menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung biologis, sumber daya tanah, air dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. (Munasinghe, 1993)



Gambar 2.1. Kerangka Segitiga Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Enviromentally Sustainable Development Triangle-World Bank)

Sumber: Serageldin and Steer dalam Rivai (2011)

Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ke-tiganya harus dipertimbangkan secara berimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumber daya alam dan lingkungan merupakan basis untuk kegiatan ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial budaya maupun kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sistem sosial yang tidak stabil atau sakit akan cenderung menimbulkan tindakan yang merusak kelestarian sumber daya alam dan merusak kesehatan

Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep Brundtland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being) generasi mendatang. Hall (1998) dalam Rivai (2011) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar; (1) perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic wellbeing; (3) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Menurut Jaya (2004) dalam Rivai (2011), konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman (1997) dalam Rivai (2011) mencoba mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian, yaitu: (1) suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption), (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak ber-kurang sepanjang waktu (non declining), (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber

daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.

Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) dalam Rivai (2011) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain: (1) untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari); (2) untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan; (3) sumber energi yang tidak terbarukan harus dieks-ploitasi secara quasisustainable, yakni mengu-rangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.

Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) dalam Rivai (2011) melihat bahwa konsep keber-lajutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, pertama, keberlajutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan peme-rintahan dan menghindari terjadinya ketidak-seimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Kedua, keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjut-an secara lingkungan harus mampu memeli-hara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga me-nyangkut pemeliharaan keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Ketiga, keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial

BRAWIJAY

diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Rivai (2011) menyebutkan bahwa konsep pembangunan pertanian di Indonesia adalah pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Sebagaimana pada kutipan berikut:

"Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju yang berkelanjutan pembangunan pertanian (sustainable agriculture), sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan pertanian (termasuk pembangunan perdesaan) yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan disemua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian."

Menurut Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan tentang pertanian berkelanjutan disepakati ada enam butir dalam rencana tindak pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian yaitu: a) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku pertanian; b) menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat dengan penataan sistem penguasaan dan kepemilikan; c) meningkatkan produktivitas lahan dan media lingkungan serta merehabilitasi tanah-tanah rusak untuk meningkatkan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan dengan tetap berpihak pada petani. dalam rangka ketahanan pangan dengan tetap berpihak pada petani; (d) membangun dan merehabilitasi prasarana dasar perdesaan, mengembangkan diversifikasi usaha dan perbaikan sarana transportasi dan teknologi pertanian serta menjamin akses pada informasi pasar dan permodalan; (e) mengembangkan ilmu pengetahuan dan

Secara konsepsual pendekatan pertanian berkelajutan merupakan pola dan cara pandang yang harus dikembangkan dengan mengintegrasikan aspek ekono-mi, sosial dan lingkungan secara sinergis. Pendekatan ekonomi berkelanjutan berbasis pada konsep maksimalisasi aliran pendapatan antargenerasi, dengan cara merawat dan menjaga cadangan sumber daya atau modal yang mampu menghasilkan suatu keuntungan. Upaya optimalisasi dan efesiensi penggunan sumber daya yang langka menjadi keharusan dalam menghadapi berbagai isu ketidakpas-tian baik aspek alam maupun non alam. Konsep sosia berkelajutan berorientasi pada manusia dan hubungan pelestarian stabilitas sosial dan sistem budaya, ter-masuk upaya mereduksi berbagai konflik sosial yang merusak. Dalam perspektif sosial, perhatian utama ditujukan pada pemerataan, pelestarian keanekaragaman budaya, serta pemanfaatan praktek pengatahuan lokal yang berorientasi panjang dan berkelanjutan. Tinjauan aspek lingkungan berkelanjutan terokus pada upaya menjaga stabilitas sistem biologis dan fisik dengan bagian utama menjaga kelangsungan hidup lingkungan masing-masing subsistem menuju stabilitas yang dinamis dan menyeluruh pada ekosistem (Salikin, 2003 dalam Rivai, 2011).

Dari ketiga aspek tersebut memiliki perhatian dan peranan yang sama pentingnya. Aspek ekonomi dan sosial memiliki keterkaitan sehingga

pertumbu-han ekonomi dapat didistribusikan secara merata pada semua lapisan sosial, seh-ingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan stratifiaksi sosial dalam masyarakat. Keterkaitan aspek ekonomi dan lingkungan sebagai pemahaman agar aktivitas ekonomi baik produksi, distribusi dan konsumsi tidak membawa dampak eksternalisasi negatif pada lingkungan dan sedapat mungkin menginternalisasikan aspek lingkungan ke dalam tindakan dan putusan ekonomi. Dan keterkaitan aspek sosial dan lingkungan bertujuan memperbaiki kualitas hidup antargenerasi secara merata dan upaya menfasilitasi partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan didasarkan pada 3 pilar yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan alam. Kondisi lingkungan alam Indonesia yang kaya dan mendukung pertanian dapat dikelola dengan baik jika dapat bersinegis dengan dua dimensi lainnya yaitu ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan kata lain sumberdaya manusia yang berkapasitas *(capable)*, berperan penting untuk mewujudkan sinergitas tersebut dan mencapai kesejahteraan petani secara mandiri.

D. Kelembagaan Petani

1. Konsep Kelembagaan Petani

Istilah lembaga dan organisasi pada umumnya digunakan bergantian sehingga memberikan ambiguitas dan kebingungan. Ada tiga kategori umum yang diakui: 1) organisasi yang tidak termasuk lembaga, 2) lembaga yang tidak termasuk organisasi, dan 3) organisasi yang merupakan lembaga (atau sebaliknya, lembaga yang termasuk organisasi) (Uphoff 1986:8). Namun Uphoff lebih menekankan pada kategori yang terakhir.

BRAWIJAY

Dalam upaya pembangunan pedesaan memerlukan kelembagaan lokal untuk kegiatan-kegiatan: pengelolaan sumberdaya alam, infrastruktur pedesaan, pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan pertanian, dan usaha nonpertanian. Oleh karena itu, Esman dan Uphoff (1986) mengkategorikan kelembagaan lokal, termasuk kelembagaan pertanian, ke dalam:

- 1. Local administration (administrasi lokal); agen dan staf lokal dari departemen-departemen pusat, bertanggung-jawab pada birokrasi di atasnya.
- 2. Local government (Pemerintahan lokal); dipilih dan ditetapkan orang seperti dewan desa, mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pembangunan dan aturan tugas, dan bertanggung-jawab pada penduduk lokal.
- 3. *Membership organizations* (Organisasi-organisasi keanggotaan); asosiasi mandiri setempat yang mempunyai anggota untuk menangani: berbagai tugas, tugas khusus, atau adanya karakteristik dan minat yang sama.
- 4. *Cooperatives* (kerjasama); semacam organisasi lokal yang menyatukan sumberdaya ekonomi anggota untuk dimanfaatkan, seperti: asosiasi pemasaran, himpunan kredit, masyarakat konsumen, atau kerjasama produsen.
- 5. Service organizations (organisasi-organisasi pelayanan); organisasi lokal yang dibentuk utamanya untuk membantu orang lain.
- 6. *Private businesses* (bisnis pribadi); bisnis yang bergerak di bidang industri, jasa dan atau perdagangan. (Uphoff, 1986 :3-4)

Mosher (1991) dalam Nangameka (2012) mengatakan, setiap usaha tani agar dapat meningkat produktivitasnya, perlu menghubungkan diri dengan struktur pedesaan profresif yang memiliki semua unsur-unsur yang tidak mungkin bagi petani mengadakan saluran tersendiri bagi masing-masing usahatani untuk memperoleh sarana produksi dan alat pertanian, dan tidak mungkin pula untuk menyelenggarakan secara khusus masing-masing dari unsur-unsur lainnya daripada struktur pedesaan progersif. Suatu struktur pedesaan progresif adalah sistem sirkulasi di daerah pedesaan yang memperlancar arus barang,

2. Arti Penting Kelembagaan Petani

Bunch (1991) menyebutkan pengembangan kelembagaan dianggap penting karena tiga alasan yaitu 1) banyak masalah pertanian yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga petani. Berbagai pelayanan kepada masyarakat petani, seperti: pemberian kredit, pengelolaan irigasi, penjualan bahan-bahan pertanian, dan sebagainya biasanya diberikan dan dikelola melalui kelompok. Oganisasi-organisasi tersebut dapat berperan sebagai perantara antara lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga swasta dalam rangka sebagai saluran komunikasi atau untuk kepentingan-kepentingan lain. 2) Dapat memberikan kelanggengan atau kontinuitas pada usaha-usaha untuk menyebarkan dan mengembangkan teknologi, atau pengetahuan teknis kepada masyarakat petani. 3) menyiapkan masyarakat petani agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang terbuka. Masyarakat petani memperkuat diri dengan mengorganisir dalam satu organisasi. Melalui organisasi tersebut masyarakat petani memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga dalam mengelola sumberdaya pertanian (Bunch, 1991)

Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), yang berupa organisasi keanggotaan (*membership organization*) atau kerjasama (*cooperatives*) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986:4). Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian organisasi petani, juga 'aturan main' (*rule of the game*) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial-kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga itu (Anantanyu 2011:103).

Guy Hunter (1970) dalam Mubyarto (1989), menyimpulkan bahwa persoalan adminsitrasi pembangunan pertanian pada pokoknya menyangkut empat hal:

1. Koordinasi di dalam tindakan-tindakan administrasi pemerintah dalam rangka melayani keperluan petani yang bermacam-macam, seperti: informasi pertanian, bantuan teknik, investasi dan persoalan kredit, pemasaran, dan lain-lain.

BRAWIJAX

- 2. Pola hubungan yang senantiasa berubah antara jasa-jasa yang dapat diberikan oleh pemerintah dengan jasa-jasa para pedagang atau koperasi.
- 3. Masalah mendorong partsipasi petani dan penduduk desa dalam keseluruhan usaha pembangunan pertanian.
- 4. Masalah kelembagaan yaitu keperluan akan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tertentu pada tahap pembangunan yang senantiasa berubah(Mubyarto 1989: 53-54).

Maka dari itu, permasalahan kelembagaan petani dalam kegiatan pertanian dapat diatasi melalui pengembangan kerjasama kelompok dan organisasi di tingkat komunitas petani. Dengan bergabungnya petani untuk membentuk suatu komunitas dalam usahatani, hal tersebut akan mempermudah petani dalam memperolah fasilitas pertanian dan sarana pembelajaran. Secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingakt produktifitas para petani.

Sejalan dengan pemahaman di atas, agar petani dapat melaksanakan kegiatan pertanian atau usahatani maka diperlukan pengetahuan yang luas pula. Menurut Suryana, dkk (1990: 264), Adapun peran kelompok tani selain dapat berperan sebagai tempat untuk saling bersama dan berkonsultasi, diantaranya:

- 1. Sebagai sarana untuk menggerakkan peningkatan produksi.
- 2. Sebagai payung bagi pertanian kelompok yang dapat memanfaatkan manajemen usahatani yang berorientasi pada nilai tambah yang maksimal baik secara kelompok maupun individual.
- 3. Sebagai unit perencanaan produksi yang dapat menyatukan aspirasi bersama.
- 4. Sebagai unit kesatuan usahatani yang dapat mengelola pertanian secara koperatif, dilihat dari tahapan proses aliran kegiatan, memang peran terbesar dalam yang dapat diambil kelompom tani berada di sektor produksi. Apalagi jika kelompok tani dapat bekerjasama dengan kelompom produktif lainnya yang ada di daerah pedesaan.
- 5. Sebagai wahana untuk pemerataan tanpa harus mengorbankan tujuan lain.

Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan dalam kelompok tani diperlukan strata organisasi yang lebih besar dan mempunyai orientasi ekonomi yang lebih besar pula. Organisasi yang lebih besar tersebut harus sekaligus memiliki badan usaha yang memiliki status formal seperti koperasi.

3. Gabungan Kelompok Tani

Istilah gapoktan sebenarnya sudah dikenal sejak awal tahun 1990-an. Kementerian Pertanian menargetkan akan membentuk satu Gapoktan di setiap desa dengan basis sosial kapital setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan. Saat ini, gapoktan diberi pemaknaan baru, termasuk bentuk dan peran yang baru. Gapoktan menjadi lembaga gerbang (gateway institution) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani (Syahyuti, 2007:15-35).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 meliputi tiga pokok pembahasan, yaitu: Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok tani, Pedoman Penyusunan Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), dan Pedoman Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU). Proses pandangan konsep tentang gapoktan diatas diharapkan menjadi dasar pembuatan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan yang saat ini menjadi acuan penyelenggaraan gapoktan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19

tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 82 Tahun 2013 tentang Pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Adapun definisi Gapoktan menurut kedua peraturan ini adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi usaha. Pada Permentan dikatakan bahwa Prinsip-prinsip Penumbuhan Gabungan Kelompoktani Penumbuhan gapoktan didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: Kebebasan, Kepahaman, Partisipatif, Keswakarsaan, Keterpaduan, dan Kemitraan. Selain itu, didasarkan pada peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 Adapun unsur pengikat yang perlu diperhatikan dalam penumbuhan Gabungan Kelompoktani anatar lain:

"Adanya tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usahatani; adanya pengurus gapoktan dan pengelola unit-unit usaha agribisnis/jasa gapoktan yang jujur dan berdedikasi tinggi untuk memajukan usahatani gapoktan; adanya unit usaha jasa/usahatani yang berkembang sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota; adanya pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan; adanya kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir; adanya manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi teknologi, pemasaran dan lain-lain."

Untuk mewujudkan akan eksistensinya dikarenakan adanya sebuah kehidupan organisasi yang berjalan didalamnya, maka gapoktan memliki fungsi yang terdiri dari lima Unit usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani dikatakan bahwa fungsi gapoktan antara lain 1) Unit Usaha

BRAWIJAY

Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi 2) Unit Usahatani/Produksi 3)Unit Usaha Pengolahan 4) Unit Usaha Pemasaran 5) Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)

Selain itu, dalam menyelenggarakan fungsinya seperti diatas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 74 Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani, maka tugas gapoktan meliputi :

"Meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri; Memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha; Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok. Membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-usaha tani." (Pasal 74 UU No.19, 2013)

Peranan penyuluh pertanian ialah untuk membantu petani-petani supaya manfaat mereka dapat menarik sebesar-besarnya dalam yang kesempatan-kesempatan yang ada untuk meningkatkan daya produksi mereka sesuai dengan kemungkinan yang ada pada masing-masing lokalitas (Mosher, 1991 dalam Nangameka, 2012). Ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraaan penyuluhan pertanian (falsafah, proses, asumsi dasar, paradigma, teknik dan metodik serta administrasi), proses adopsi dan penyesuaian atau perubahan berusaha tani (melalui intensifikasi, diversifikasi, maupun ekstensifikasi dan rehabilitasi) berlangsung melaui suatu pola umum proses belajar yang sama. (Suryana dkk, 1990:116)

Penyuluhan pertanian dibangun dengan sasaran agar petani Indonesia bisa mengembangkan usahataninya secara lebih spesifik sesuai dengan potensi dan kondisi diri dan lingkungan masing-masing untuk mendapatkan hasil usahataninya

yang lebih baik (Suryana, 1990:117). Penyuluhan pertanian merupakan bagian subsistem jasa dan informasi yang telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam 'modernisasi' pertanian di Indonesia, termasuk didalamnya terdapat upaya memajukan usahatani petani dalam pertanian.



BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan pendapat beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah peneliti melakukan sebuah penelitian dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berdasarkan sifat-sifat keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:15), menjelaskan bahwa:

"Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandas-kan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya Sukmadinata (2009:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini meng-gunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian ini ditujukan untuk membatasi masalah-masalah yang akan dijabarkan agar tidak keluar dari pembahasan pokok. Fokus dalam peneliltian ini diambil dari teori Pembangunan Pertanian Berkelanjutan menurut Munasinghe (1993) antara lain:

- 1. Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan:
 - a. Dimensi Ekonomi
 - b. Dimensi Sosial
 - c. Dimensi Lingkungan
- 2. Faktor pendukung dan penghambat upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan:
 - a. Rekruitmen
 - b. Sarana
 - c. Jejaring Kemitraan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang merepresentasikan permasalahan penelitian yang cakupan wilayahnya lebih luas dari situs penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lamongan. Adapun lokasi penelitian dipilih karena Kabupaten Lamongan masuk dalam kategori daerah lumbung pangan Jawa Timur. Produktifitas padi dan jagung di daerah Lamongan termasuk tinggi hal tersebut

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan yang mana terdapat perkumpulan Gabungan Kelompok tani bernama Gapoktan "Podo Rukun". Gapoktan Podo Rukun di desa Rumpuk sebagai situs penelitian karena merupakan kelembagaan petani yang berhasil memperoleh dan menjalankan program pengelolaan dana PUAP, memanfaatkan dan mengembangkan dana tersebut, serta mandiri dalam laporan pertanggungjawabannya. Gapoktan Podo Rukun berada di desa Rumpuk yang merupakan desa Mandiri Pangan dan Bioenergi. Untu itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya gapoktan dalam *Sustainable Agriculture* atau pertanian yang berkelanjutan,

D. Sumber dan Jenis Data

Secara garis besarnya sumber data yang dimaksud dibedakan atas orang, tempat, kertas atau dokumen. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya pada saat dilakukan penelitian yang terkait dengan kajian yang diteliti

BRAWIJAYA

dengan cara melakukan wawancara terhadap informan-informan yang telah ditentukan. Data primer penelitian ini didapatkan dari:

- a. Bapak Sukadi, S.P., M.M. selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber
 Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 Kabupaten Lamongan
- Bapak Agus Sutikno, S.P., M.P. selaku Petugas Penyuluh Lapangan Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan
- c. Bapak Samin selaku Kepala Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan
- d. Bapak Selamet selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan
- e. Ibu Sunarti selaku Bendahara Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan
- f. Bapak Suyono selaku masyarakat petani Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan
- g. Bapak Sardjo selaku masyarakat petani Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup,
 Kabupaten Lamongan
- h. Bapak Abdul Shomad selaku masyarakat petani Desa Rumpuk, Kecamatan
 Mantup, Kabupaten Lamongan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak dilakukan oleh peneliti sendiri, tetapi diperoleh dari sumber-sumber tertentu, baik berupa dokumen maupun berupa catatan tertulis. Adapun data sekunder dan penelitian ini

berasal dan catatan, dokumen, laporan serta arsip dengan fokus penelitian yang ada pada Gapoktan "Podo Rukun", Desa Rumpuk, UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup dan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Kabupaten Lamongan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:225) adalah langkah strategis untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah cara memperoleh data dengan pengamatan secara langsung di lapangan pada obyek penelitian. Peneliti mernakai model observasi terus terang. Menurut Sanafiah dalam Sugiyono (2013:225) model observasi terus terang terjadi ketika peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang bahwa sedang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura, Badan Penyuluh Pertanian serta UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup, serta Gabungan Kelompok Tani "Podo Rukun" yang ada di desa Rumpuk Kec. Mantup Kabupaten Lamongan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semierstruktur (*semistructre interview*). Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:233) wawancara semiterstruktur bertujuan untuk menemukan permasalan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti memanfaatkan dokumen yang didapat dan lokasi penelitian untuk kemudian dipelajari dan memasukkannya ke dalam hasil penelitian apabila memiliki keterkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat mengumpulkan dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan saat melakukan penelitian di desa Rumpuk dan UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup.

F. Instrumen Penelitian

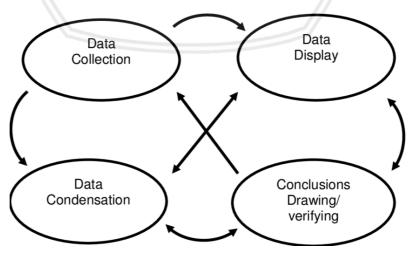
Sugiyono (2013:8) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument* yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, peneliti harus merniliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang

BRAWIJAYA

- Untuk wawancara peneliti rnenggunakan pedoman wawancara sebagai ker angka dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini
- 2. Untuk teknik observasi, peneliti pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian
- 3. Untuk teknik pengumpulan data terutarna data sekunder, peneliti menggunakan alat pencatatan dokumentasi.

G. Analisis Data

Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Miles dan Huberman (2014) bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.



Gambar 3.1. Analisis Data Model Interaktif Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.





BRAWIJAY

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamo

a. Aspek Geografis

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,80 Km² setara 181.280 Ha atau + 3.78 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km. Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gresik

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Jombang dan Kab. Mojokerto

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban.



Gambar 4.1. Peta Kabupaten Lamongan

Sumber: loketpeta.pu.go.id, 2019

- a. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Sarirejo dan Kembangbahu
- b. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokoro.
- c. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Maduran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah

1. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0-25 m dengan luas 50,17% dari luas Kabupaten Lamongan, daratan ketinggian 25-100 m seluas 45,68% dan sisanya 4,15% merupakan daratan dengan ketinggian di atas 100 m dari permukaan air laut.

2. Kondisi Geologi

3. Kondisi Hidrologi

Secara umum keberadaan air di Kabupaten Lamongan didominasi oleh air permukaan, dimana pada saat musim penghujan dijumpai dalam jumlah yang melimpah hingga mengakibatkan bencana banjir namun sebaliknya pada saat musim kemarau disebagian besar wilayah Kabupaten Lamongan relatif berkurang. Ketersediaan air permukaan ini sebagian tertampung di waduk-waduk, rawa, embung dan sebagian lagi mengalir melalui sungai-sungai. Kabupaten Lamongan dilewati oleh 3 buah sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo sepanjang ± 68 Km dengan debit rata – rata 531,61 m³/bulan (debit maksimum 1.758,46 m³ dan

BRAWIJAYA

4. Kondisi Klimatologi

Aspek klimatologi ditinjau dari kondisi suhu dan curah hujan. Keadaan iklim di Kabupaten Lamongan merupakan iklim tropis yang dapat dibedakan atas 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan-bulan lain curah hujan relatif rendah. Rata-rata curah hujan pada Tahun 2010 dari hasil pemantauan 25 stasiun pengamatan hujan tercatat sebanyak 2.631 mm dan hari hujan tercatat 72 hari.

5. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari pemanfaatannya, kondisi tata guna tanah Kab. Lamongan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.Pemanfaatan Tanah Kabupaten Lamongan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Pemukiman	13,030.00	7.19
2	Sawah Irigasi	45,841.00	25.29
3	Sawah Tadah Hujan	33,479.00	18.47

BRAWIJAYA

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
4	Perkebunan	9,919.14	5.47
5	Hutan	33,717.30	18.60
6	Hutan Rakyat	7,098.10	3.92
7	Tambak	1,380.05	0.76
8	Sungai	8,760.00	4.83
9	Waduk	8,719.50	4.81

Sumber: lamongankab.go.id, 2011

Penggunaan lahan pada Kabupaten Lamongan terdiri dari penggunaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, dan kawasan pesisir.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

1) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian yang terdapat di Kabupaten Lamongan secara keseluruhan seluas 91.458,91 ha dengan rincian : pertanian lahan basah (sawah) seluas 79.320 ha dan pertanian lahan kering/ hortikultura (bukan sawah) seluas 12.138,91 ha. Dimana untuk kawasan jenis ini keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kawasan ini mampu menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah.

BRAWIJAYA

2) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Lamongan tersebar secara tidak merata pada setiap kecamatan, dengan luas lahan seluas 9.919,14 ha. Jenis komoditi perkebunan yang ada antara lain adalah tanaman tebu, tembakau, kapas, kenaf, kelapa, jambu mete dan cabe jamu. Agar nilai ekonomisnya menjadi lebih tinggi maka sebaiknya komoditi yang ada dapat ditingkatkan dan pengolahan diperhatikan karena perkebunan ini tidak ada pada setiap kecamatan.

3) Kawasan Peternakan

Secara umum peternakan di Kabupaten Lamongan di kembangkan pada budidaya ternak besar dan kecil, penggemukan (fattening), unggas yaitu ayam ras, ayam buras, puyuh dan itik. Pada budidaya ternak sapi Kabupaten Lamongan merupakan sentra unggulan pengembangan ternak jenis sapi PO di kawasan Jawa Timur sedangkan ayam ras/pedaging dikembangkan melalui pola kemitraan dan mandiri. Jenis produksi ternak di Kabupaten Lamongan di bedakan menjadi telur (Kg), susu(Ltr), daging (Kg) dan kulit. Dimana, untuk jenis produksi daging merupakan hasil produksi dengan jumlah tertinggi, begitupun dengan harga rata – rata jenis produksi daging memiliki harga rata – rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis produksi lainnya.

4) Kawasan Perikanan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sentra perikanan budidaya berupa sawah tambak

dengan luas 23.774,73 Ha tersebar di wilayah tengah dan Lamongan dengan

5) Kawasan Industri

Kabupaten Lamongan memiliki beragam jenis Industri yang memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian wilayah Kabupaten. Berdasarkan Masterplan Pengembangan Pantai Utara Lamongan terdapat 4

6) Kawasan Pariwisata

Kabupaten Lamongan memiliki banyak potensi pariwisata yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, objek wisata di Kabupaten Lamongan terdiri dari Wisata Alam (Wisata Bahari Lamongan, Waduk Gondang,Goa Maharani dan Zoo dan Sumber mata air Panas Tepanas), Wisata Budaya (Monumen xan Der Wijck, Makam Sunan Drajad, Makam Sendang Duwur, Makam Joko Tingkir, Makam Nyai Ratu Andongsari dan Desa Balun). dan Wisata Buatan (TPI di Wilayah Pantura dan Sudetan Bengawan Solo).

c. Kondisi Demografi

Secara administratif Kabupaten Lamongan terbagi atas 27 Kecamatan, meliputi 462 Desa dan 12 Kelurahan yang terbagi dalam 1.486 dusun dan 309.976 RT, dengan jumlah penduduk tahun 2012 (Disdukcapil, 2012), mencapai 1.284.379 jiwa yang terdiri dari 643.532 jiwa laki-laki dan 640.847 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur, masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, pedagang, nelayan dan jasa. Selama dua tahun terakhir ini (2011 – 2012), laju

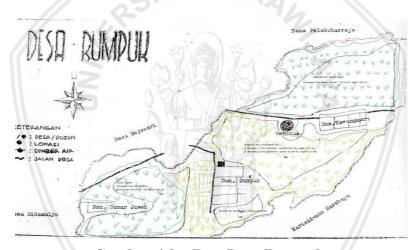
BRAWIJAY

pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar minus 0,17% dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk 709 orang per km².

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Aspek Geografis Desa Rumpuk

Gapoktan Podo Rukun terletak di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran yang subur dan cocok untuk pengembangan tanaman pangan dan peternakan. Berikut adalah peta desa Rumpuk:



Gambar 4.2. : Peta Desa Rumpuk

Sumber: Kepala Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, 2019

Adapun perbatasan Desa Rumpuk bagian utara berbatasan dengan desa Plabuhanrejo, bagian selatan berbatasan dengan desa Sidomulyo, bagian barat berbatasan dengan desa Mojosari dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.

b. Aspek Demografi Desa Rumpuk

Secara administratif desa Rumpuk memiliki tuga dusun, yaitu dusun Rumpuk, Tawangsari, dan Sumur Juwet. Jumlah penduduk desa Rumpuk adalah

2048 jiwa yang terbagi atas 967 jiwa laki-laki dan 1081 jiwa perempuan. Dari 2048 jiwa tersebut yang pernah mengenyam pendidikan sebanyak 1921 jiwa. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Data Pendidikan masyarakat desa Rumpuk

	Tuber 1020 Duta Perantum masyaramat acsa Rampan								
No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah					
		(Orang)	(Orang)	(Orang)					
1	Usia 3-6 tahun yang	57	60	117					
	sedang TK/ playgroup								
2	Usia 7-18 tahun yang	200	230	430					
	sedang sekolah								
3	Usia 18-56 tahun tidak	5	36	41					
	tamat SD	KASRA							
4	Usia 12-56 tahun tidak	2	3	5					
	tamat SMP/ Sederajat		14.						
5	Tamat SD/ Sederajat	463	308	771					
6	Tamat SMP/ Sederajat	115	260	375					
7	Tamat SMA/ Sederajat	109	70	179					
8	Tamat D-1/ Sederajat	2	1	3					
	Jumlah Total	953	968	1921					

Sumber: Kepala Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah terbanyak dimiliki oleh masyarakat yang tamat SD/ sederajat yaitu sebanyak 771 orang. Kemudian disusul oleh penduduk dengan usia 7-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan atau bersekolah yaitu sebanyak 430 orang. Sedangkan, mata pencaharian masyarakat desa Rumpuk dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Jenis Pekerjaan masyarakat desa Rumpuk Tahun 2018

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Petani	607	352	959

2	Buruh Tani	43	29	72
3	Pegawai Negeri Sipil	2	1	3
4	Pengrajin industri rumah	8	0	8
	tangga			
5	Pedagang Keliling	20	0	20
6	Peternak	5	0	5
7	Perawat Swasta	1	0	1
8	TNI	2	0	2
9	Karyawan perusahaan	54	60	114
	swasta			
	Jumlah Total	742	442	1184

Sumber: Kepala Desa Rumpuk, kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas atau sebagian besar masyarakat desa Rumpuk bekerja pada sektor pertanian, baik menjadi petani maupun buruh tani. Hal tersebut didukung dengan luasnya lahan pertanian di desa Rumpuk.

c. Potensi Desa Rumpuk

Desa Rumpuk tercatat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sektor pertanian, dikarenakan memiliki lahan pertanian yang luas dan bisa diandalkan, yaitu lahan tadah hujan seluas 237 Ha. Desa Rumpuk memiliki potensi untuk pengembangan sektor pertanian dan tanaman pangan. Data Potensi Agribisnis Desa Rumpuk sebagai berikut:

Tabel 4.4. Potensi Agribisnis Desa Rumpuk

2 (Nama Poktan	g ta O	La ha n	an A w	M	Komoditas Unggulan
-----	-------------	--------------	---------------	--------------	---	--------------------

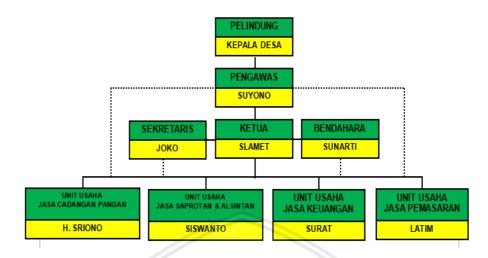
	(Desa)	(Desa)							Biji	Teri	Ternak	
						Padi	Jagung	Kedelai	Kangkung Biji	Sapi	Kambing	HORTI
1	Murah Rejeki (Tawangsari)	187	98.9	1979	2015	x	x	-	x	x	х	-
2	Tani Raharjo (Rumpuk)	145	50.4	1979	2015	x	X	х	-	x	x	-
3	Tani Sejahtera (Rumpuk)	122	52.2	2008	2015	X	x	х	-	x	X	-
4	Sri Rejeki (Sumur Juwet)	44	35.5	1979	2015	x	X	-		x	х	-
T	TOTAL 498 237											

Sumber: UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa komoditas di pertanian maupun peternakan desa Rumpuk yang antara lain padi, jagung, kedelai, kangkung biji, sapi dan kambing. Hal ini menjadi faktor pendukung desa Rumpuk menjadi desa pertanian yang MAPAN BENER atau singkatan dari Mandiri Pangan dan Bioenergi karena hasil pertaniannya dijual ke masyarakat pedagang setempat dan limbah dari peternakannya diolah menjadi bioenergi.

d. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengurus Gapoktan Podo Rukun Desa Rumpuk

Gapoktan desa Rumpuk terbentuk pada tanhun 2008 dan disahkan dan berbadan hukum pada tahun 2015 yang kemudian diberi nama Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) "Podo Rukun". Adapun struktur organisasi dari Gapoktan Podo Rukun sebagai berikut :



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Gapoktan Podo Rukun Sumber: UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, 2019

Adapun kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun adalah kelompok tani Murah Rejeki dari dusun Tawangsari, kelompok tani Tani Raharjo dan Tani Sejahtera dari dusun Rumpuk, serta kelompok tani Sri Rejeki dari dusunm Sumur Juwet.

Pada Gabungan Kelompok Tani, pengurus berperan penting dalam melaksanakan tugas-tugas atau urusan-urusan yang ada dalam menjalankan organisasi maupun untuk mencapai tujuan bersama organisasi. Beberapa jabatan dan unit di Gapoktan Podo Rukun meliputi Pelindung yaitu Kepala Desa, Pengawas yaitu dipilih dari kepala dusun, ketua, sekretaris, bendahara dan unit-unit usaha tani lainnya. Dalam hal ini uraian tugas pengurus Gapoktan dijelaskan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Jabatan dan Uraian Tugas Pengurus Gapoktan Podo Rukun

Jabatan Uraian Tugas	
----------------------	--

Komisi Pengarah (Pelindung dan Pengawas)	 Menjalankan fungsi-fungsi pengawas mengacu pada petunjuk yang berlaku Mengarahkan organisasi sesuai AD/ART Gapoktan Memberikan arahan demi tercapainya tujuan lembaga Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
rectuu	Menandatangani surat-surat Mewakili kepentingan Gapoktan ke dalam dan ke luar Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen gabungan kelompok
Sekretaris	Membuat dan memelihara notulen rapat anggota dan rapat pengurus Membuat undangan rapat Melaksanakan surat-menyurat dan persiapannya Menyelenggarakan administrasi non keuangan yang diperlukan Menyusun kegiatan bulanan dan tahunan
Bendahara	1. Membukukan setiap transaksi keuangan yang terjadi 2. Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga, yang diperjual belikan atau dipindah dalam usaha gabungan 3. Menyimpan dan memelihara semua arsip yang lengkap mengenai segala transaksi keuangan, menyimpan dengan baik semua buku bon, surat berharga dan barang-barang tanggunganjaminan sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diperiksa oleh pengawas 4. Bertanggung jawab atas terselenggarannya sistem pembukuan gabungan yang standar dan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. 5. Menyusun laporan keuangan tahunan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus di dalam rapat anggota tahunan, yang telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang badan pemeriksa dan ditempelkan ditempat yang mudah dilihat anggota, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya. 6. Menerima semua pembayaran atas nama gabungan dan
Bendahara	menyimpannya ditempat aman yang telah ditentukan oleh pengurus 7. Melakukan tugas-tugas lain, seperti menandatangani surat perjanjian kredit dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas bendahara
Unit Usaha Saprodi dan Alsintan	Melakukan perencanaan dan pengorganisasian kebutuhan saprodi, diantaranya merencanakan kebutuhan benih padi, pupuk bersubsidi, kebutuhan pestisida. Sedangkan, unit usaha jasa alsintan ini mengelola beberapa alat mesin pertanian seperti handtractor.
Unit Usaha	Melakukan kegiatan identifikasi, analisis potensi dan peluang

Pemasaran Hasil	pasar hasil panen seperti padi. Melakukan pengadaan beras					
Pertanian	organik yang diproduksi dari lahan petani anggota Gapokta					
	Podo Rukun sendiri.					
Unit Usaha Jasa	Unit usaha Simpan Pinjam ini berdiri sejak Gapoktan					
Keuangan	menerima dana BLM-PUAP, yaitu tahun 2010. Selanjutnya					
	lembaga simpan pinjam Gapoktan ini disebut LKM-A					
	(Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis) Podo Rukun.					
Unit Usaha	Unit usaha pemberdayaan lumbung kemakmuran di setiap					
Cadangann	dusun untuk menyimpan gabah warga atau anggota. Gabah					
Pangan	disimpan saat musim panen untuk dimanfaatkan pada masa					
	non-panen.					

(Sumber: AD/ART Gapoktan Podo Rukun dan PPL desa Rumpuk, 2019)

B. Penyajian Data

1. Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan

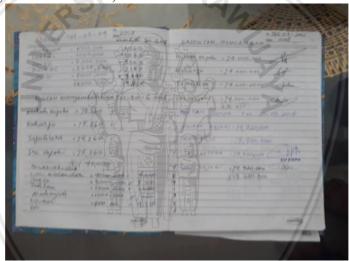
a. Dimensi Ekonomi

Pertanian agar dapat berjalan secara berkelanjutan pastinya membutuhkan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan para petani. Karena organisasi Gapoktan berada pada lingkup pedesaan, bantuan dan modal dari pemerintah sangatlah diperlukan. Berikut penjelasan dari PPL Desa Rumpuk terkait dana bantuan dari pemerintah berupa Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP):

"Program bantuannya ada PUAP. PUAP hampir sama seperti di Koperasi walau sistem simpan pinjamnya tidak sama penuh. Karena pinjaman kepada petani bersifat musiman. Tiap 4 bulan sekali dilakukan pengembalian dan dalam 1 tahun dimasukkan ke bank lagi. Nominal 100 juta merupakan pinjaman oleh anggota melalui ketua Gapoktan. Pengurus PUAP Desa Rumpuk yang memegang kendali adalah pengawas. Pengawas merupakan seseorang yang ulet dan kekeuh dengan aturan yang ada di AD/ART. Hubungan antar anggota sangat erat. Disini yang menangani ya koperasi mbak, namanya LKMA. Bantuannya berupa saprodi seperti bibit gitu, sama alsintan hand tractor, hibah slep.". (Hasil wawancara dengan pak Agus selaku PPL Desa Rumpuk pada hari Selasa, 19 Maret 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa dana PUAP senilai seratus juta yang selanjutnya akan dikembangkan dan simpan pinjam musiman oleh petani. Penanggung jawab dana tersebut adalah pengawas yang taat terhadap AD/ART. Sependapat dengan hasil wawancara tersebut, Kepala Desa Rumpuk menjelaskan sebagai beriku:

"Modalnya hanya 100 juta sekarang sudah sekitar 300 juta. Sebagian uang tersebut dimintai bergiliran untuk membuat galengan. Tugas kepala desa hanya sebagai pengawas aja, yang penting tiap tahun ada RAT, yang mengelola ya unit keuangan LKMA". (Hasil wawancara dengan pak Samin selaku Kepala Desa Rumpuk pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019)



Gambar 4.4. Catatan Simpan Pinjam Gapoktan Podo Rukun Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Dari hasil wawancara dengan kepala desa tersebut, hasil pengembangan dari dana PUAP digunakan untuk membuat *galengan* atau jalanan antar sawah. Pernyataan lebih rinci terkait bantuan dari pemerintah dijelaskan oleh salah satu petani dari masyarakat anggota kelompok tani berikut:

"Awal dapat PUAP tahun 2010 bulan 11. Waktu itu pencairannya, kita diajari cara mengembangkan dan mengelola, dan murni gak boleh kemana-mana. Kita cairkan dana untuk pembibitan, pemupukan. Sistem yang digunakan dalam simpan pinjam adalah musiman, bukan

BRAWIJAX

perbulan. Masalah bantuan dari pemerintah itu, petani kita sangat butuh. Sekarang semua butuh mesin. Kalau terkait *slep* itu hibah dari pemerintah sudah berjalan juga, sudah beberpa tahun. *Slep* ini hanya Rumpuk yang dapat. *Slep* untuk umum jadi ditaruh di desa. Jadi 4 Gapoktan ini digilir masalah pengelolaannya. Kalau kita tidak bisa mengelola, tetap kita sewakan biar lebih berguna. Uang sewana masuk kas". (Hasil wawancara dengan pak Suyono selaku Anggota Kelompok Tani pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Kemudian, dalam kepengurusan Gapoktan tidak terdapat insentif yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

"Kalo insentif untuk pengurus ya gak ada, ya itu kesepakatan tidak ada terlalu tinggi, ya sebagai uang lelah saja lah, ya sekedarnya saja. Jadi jumlahnya ditentukan dari keputusan bersama, ya betul musyawarah. Ya inisiatif masyarakat sendiri mbak, untuk menghargai jasa pengurus. Dananya berkembang, jadi petani yang butuh modal bisa ngurus ke Gapoktan" (Hasil wawancara dengan bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pemerintah penting bagi keberlangsungan pertanian masyarakat desa Rumpuk. Bantuan yang diberikan kepada Gapoktan Podo Rukun desa Rumpuk berupa dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dikelola LKMA, alat dan mesin pertanian seperti *handtractor*, pupuk, obat-obatan (hama), dan hibah berupa mesin *slep*. Tidak ada insentif, namun ada inisatif warga sendiri untuk mengadakan uang lelah. Dana PUAP adalah bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai seratus juta rupiah yang kemudian digunakan sebagai modal para petani untuk proses pengelolaan sawah serta dikembangkan.

b. Dimensi Sosial

Seiring dinamika dan berkembangnya jaman, masalah yang terjadi tentunya semakin kompleks dan beragam, untuk itu dalam upaya untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan pada desa Rumpuk memerlukan komitmen bersama yang baik agar tercipta keadaan sosial yang kondusif seperti hasil wawancara berikut:

"Permasalahan pasti ada, tapi ya tidak sampai besar, tapi kembali ke semua pengurus dan anggota, jadi punya komitmen dan berusaha semampunya, memang kalau dilihat dari masyarakat itu tidak semua punya minat, ada yang kendor, nah itu bagaimana kita nya menyadarkan dan lain-lain". (Hasil wawancara dengan bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Menurut hasil wawancara tersebut disampaikan bahwa meskipun masalah selalu ada namun pengurus dan anggota berusaha memberikan penyadaran kepada petani yang kurang aktif. Salah satu bentuk untuk meningkatkan komitmen bersama adalah dengan diadakannya jumat bersih dan gotong royong, seperti hasil wawancara berikut:

"Setiap hari jumat itu ada jumat bersih, diikuti oleh perempuan dan laki-laki, termasuk buat rumah juga dikerjakan gotong royong". (Hasil wawancara dengan pak Selamet selaku Ketua Gapoktan Podo Rukun pada hari Rabu, 20 Maret 2019)



Gambar 4.5. Partisipasi anggota Gapoktan Podo Rukun yang antusias mendengarkan PPL

Sumber: dokumentasi narasumber (PPL), 2019

"Presentase dari 100% maka, 0,03% yang bermasalah, yang lain aman. Aktif sekali. Desa Rumpuk merupakan desa mandiri pangan dan bioenergi (MAPAN BENER). Maka, orang-orang yang ada cukup proaktif bahkan di lumbung dan bisa diamati dari prestasi juara 2 lumbung pangan Lamongan pada 2008. Bertanggungjawab kepada keputusan dan dilaksanakan bersama-sama. Gotong royong juga. Partisipasi Kades juga proaktif". (Hasil wawancara dengan pak Agus selaku PPL Desa Rumpuk pada hari Selasa, 19 Maret 2019)



Gambar 4.6. Piala Juara 2 Lumbung Pangan Kabupaten Lamongan

Sumber: dokumentasi peneliti, 2019



Gambar 4.7. Piala Prestasi Gapoktan Podo Rukun Sumber: dokumentasi penulis, 2019

Tentunya dalam Gapoktan, kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua gapoktan sangat penting dalam mempengaruhi keberlanjutan. Dalam keberhasilan sebuah organisasi salah satunya didukung oleh faktor kepemimpinan yang baik. Seperti yang dinyatakan pada hasil wawancara berikut:

"Faktor kepemimpinan sangat berpengaruh dalam keberhasilan Gapoktan, jika pemimpinnya kurang pintar mengelola ya nanti berdampak pada Gapoktan. Intinya kalau dia punya kemampuan maka sering dipilih, bisa langsung praktek". (Hasil wawancara dengan pak Sukadi selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan pada hari Senin, 18 Maret 2019)

Menurut Bendahara Gapoktan Podo Rukun, sikap kemauan, kejujuran, dan kemampuan ketua gapoktan menjadi faktor pendukung keberhasilan gapoktan, selain itu peran kepemimpinan kepala desanya juga mendukung sebagaimana berikut:

"Ya sangat mendukung (kepemimpinan ketua Gapoktannya), peran kadesnya juga enak mbak, mendukung banget, kalau butuh Sependapat dengan pernyataan di atas, seperti hasil wawancara dengan anggota kelompok tani berikut:

"Faktor kepemimpinan juga mempengaruhi Gapoktan, mulai dari perkembangan Gapoktan, komitmen, semua perangkat juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan, musyawarah". (Hasil wawancara dengan pak Suyono selaku Anggota Kelompok Tani pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Kepemimpinan ketua gapoktan adalah memiliki kemauan, kemampuan dan kejujuran dalam menjalankan peran dan menyelesaikan masalah dengan cara musyawaraha. Selain ketua gapoktan, kepemimpinan juga didukung oleh peran kepala desa yang juga proaktif dalam menyelesaikan tugas dan masalah.

Selain itu, dimensi sosial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan. Gapoktan dibina oleh PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang berada di setiap kecamatan yang kemudian disebar ke desa. Satu Gapoktan terdapat satu penyuluh. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pembina pada Gapoktan, cara kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam memberikan pelatihan dan pembinaan lebih ditujukan pada sistem latihan dan kunjungan (LAKU). Adapun kegiatan penyuluhan didasarkan pada pembinaan yang sifatnya rutin dan insidental. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang PSDM Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

"Fungsi dan peran Dinas yaitu membina para petani. Yang ngasih pelatihan tetap PPL. Pelatihan yang diberikan dulu seperti pembuatan

BRAWIJAYA

biogas, pembuatan kripik. Pelatihan dan pembinaannya dilakukan di lapang namanya LAKU (Latiham dan Kunjungan). Kalau pelatihan biasanya dipanggil ke Dinas kalau gak dikirim ke Nganjuk dan Malang dan sebagainya. Kalau pembinaan di setiap Gapoktan. Pembinaan di penyuluh tiap bulan ada. Pelatihan ini menyesuaikan anggaran, paling tidak satu tahun ada 2 pelatihan. Volumenya sekitar 60 orang". (Hasil wawancara dengan Pak Sukadi selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perkebunan Kabupaten Lamongan pada Hari Senin, tanggal 18 Maret 2019)



Gambar 4.8. salah satu kegiatan di UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup

Sumber: Dokumentasi narasumber (PPL), 2019

Sependapat dengan hal tersebut, Petugas Penyuluh Lapangan Desa Rumpuk menyatakan bahwa pelatihan dilakukan 2 kali dalam satu tahun yang mencakup bagaimana mengolah hasil pertanian warga. Selain dilatih, anggota dan pengurus Gapoktan juga dibina untuk meningkatkan motivasi mereka, hal ini dikarenakan Gapoktan Podo Rukun merupakan Gapoktan kelas lanjut yang masih perlu meningkatkan lagi motivasi untuk berinovasi. Pelatihan dan pembinaan dilakukan di salah satu rumah warga dan bersifat insidental, seperti yang dijelaskan oleh PPL desa Rumpuk berikut:

"Resmi belum ada. Tapi biogas dan pemupukan sudah ada. Tapi tetep dibina biasa juga untuk kelompok ternak, tapi kurang seberapa produktif karena jumlah sapi. Pembinaan berupa motivasi penggunaan dan pemanfaatan. Khususnya inovasi. Ada beberapa kelas, pemula, lanjut, madya dan utama. Dan Gapoktan Podo Rukun termasuk kelas Lanjut. Iya dan pengolahan limbah, ketika dari litbang pada 2014, melihat pengelolaan limbah tebu untuk difermentasi baru diberikan pada ternak. Di rumah salah satu warga. PPL memiliki laporan dan kunjungan ke rumah Poktan bisa ketua atau anggotanya. Yang mengikuti semuanya, tapi melihat dari kegiatan juga. Pelatihan 2x selama setahun. Pembinaan insidental bisa kapan saja". (Hasil wawancara dengan Pak Agus PPL Desa Rumpuk pada hari Selasa, 19 Maret 2019 di UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup)



Gambar 4.9. Bapak Agus selaku PPL sedang memberi pembinaan terhadap anggota Gapoktan Podo Rukun

Sumber: Dokumentasi narasumber (PPL), 2019

Menurut hasil wawancara dengan Bendahara Gapoktan Podo Rukun, pelatihan dilakukan di kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta di kantor UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup. Selain dibina dan dilatih terkait hasil panen, pelatihan dan pembinaan juga terkait bagaimana Gapoktan dapat menyelesaikan urusan pembukuan dan Laporan Pertanggungjawaban dengan baik dan benar seperti hasil wawanacara berikut:

"kalau pelatihan itu kita biasanya dilatih di Lamongan itu bisa satu tahun sekali, bisa juga 2 kali setahun, dan ada juga di kecamatan di UPT itu. Kabupaten sering, itu kalau di kabupaten juga verifikasi juga monitoring, uangnya dapat jadi berapa dan prosesnya seperti apa kalau di Lamongan. kalau di UPT sini kita melihat saja laporannya seperti apa dan bagaimana". (Hasil wawancara dengan bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun pada Rabu, 20 Maret 2019)



Gambar 4.10. Sebagian pembukuan Gapoktan Podo Rukun Sumber: dokumentasi peneliti, 2019

Pembinaan dan pelatihan juga mengenai bagaimana cara pengelolaan alat dan mesin pertanian seperti *Slep* dan *Handtractor*. Selain itu pembinaan dan pelatihan juga terkait dana yang didapat dari pemerintah yaitu dana Pengem bangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang mana dana tersebut harus dikelola dan dikembangkan seperti yang dinyatakan oleh hasil wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani di Desa Rumpuk berikut:

"Setiap 6 bulan sekali ada pembinaan, dihadiri dari UPT tapi juga didampingi oleh PPL. Di Gapoktan itu banyak yang dikerjakan, kaya slep, handtractor, dana pengembanagan dari pemerintah. Awal dapat PUAP tahun 2010 bulan 11. Waktu itu pencairannya, kita diajari cara mengembangkan dan mengelola, dan murni gak boleh kemana-mana".

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi sosial masyarakat desa Rumpuk yang baik dicerminkan dari keberhasilan desa Rumpuk mencapai desa yang mandiri pangan dan bioenergi serta komitmen bersama yang dipengaruhi oleh peran semua pihak yaitu PPL, kepala desa, pengurus dan anggota Gapoktan Podo Rukun. Wujud komitmen bersama yang baik Gapoktan Podo Rukun desa Rumpuk adalah sikap gotong-royong, jumat bersih, dan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah atau keputusan bersama Dampak dari komitmen bersama yang baik adalah setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik dan menumbuhkan prestasi Gapoktan Podo Rukun seperti menjadi Desa Mandiri Pangan dan Bioenergi serta menjadi juara 2 lumbung pangan di Kabupaten Lamongan. Selain itu petani desa Rumpuk juga diberdayakan melalui pelatihan dan pembinaan. Penyuluh Lapangan (PPL) dalam memberikan pelatihan dan pembinaan lebih ditujukan pada sistem latihan dan kunjungan (LAKU). Adapun kegiatan penyuluhan didasarkan pada pembinaan yang sifatnya rutin dan insidental. Pelatihan biasa dilakukan 2-3 kali dalam satu tahun yang mencakup bagaimana mengolah hasil pertanian warga. Selain itu, anggota dan pengurus Gapoktan juga dibina untuk meningkatkan motivasi mereka, hal ini dikarenakan Gapoktan Podo Rukun merupakan Gapoktan kelas lanjut yang masih perlu meningkatkan lagi motivasi untuk berinovasi. Pelatihan dan pembinaan dilakukan di salah satu rumah warga dan bersifat insidental. Pelatihan dan pembinaan juga terkait bagaimana Gapoktan dapat menyelesaikan urusan pembukuan dan Laporan Pertanggungjawaban dengan baik dan benar, cara pengelolaan dan perawatan alat dan mesin pertanian seperti *Slep* dan *Handtractor*, dan juga terkait dana yang didapat dari pemerintah yaitu dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang mana dana tersebut harus dikelola dan dikembangkan.

c. Dimensi Lingkungan

Dimensi yang ketiga yaitu dimensi Lingkungan. Dalam upaya pembangunan pertanian berkelanjutan tentunya masyarakat juga dituntut untuk memperhatikan keberlangsungan lingkungan maupun sumber daya alam yang ada. Salah satu upaya masyarakat adalah pemanfaatan limbah peternakan menjadi biogas dan pupuk organik sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

"Ya mbak kotoran ternaknya untuk biogas dan pupuk organik". (Hasil wawancara dengan pak Abdul Shomad selaku masyarakat petani di desa Rumpuk pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Kondisi sumber daya alam desa Rumpuk juga berperan penting untuk pertanian mereka salah satunya yaitu tanah yang cocok untuk ditanami tanaman pangan, seperti hasil wawancara berikut ini:

"Kalau tanah disini alhamdulillah bagus subur-subur saja mbak, tidak pernah ada kendala, jenisnya emang untuk tanam padi, jagung, dan kedelai. Ya mengandalkan air hujan, ada sumur bor juga untuk kemarau" (Hasil wawancara dengan pak Sardjo selaku masyarakat petani di desa Rumpuk pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Jenis sawah di desa Rumpuk adalah tadah hujan yang artinya kebutuhan air mayoritas mengandalkan hujan. Oleh karena itu pola tanam atau pemanfaatan sawah juga ditentukan agar sawah terpakai secara optimal. Seperti hasil wawancara berikut ini:

"Jadi kalau bertanam itu modelnya gantian mbak. Ya hanya memanfaatkan hujan. Begini, kalau Oktober sampai Februari itu panen padi, jagung dan kedelai. Maret sampai Mei tanam padi. Mei sampai September tanam jagung dan kangkung. Akhirnya sampai musim hujan lagi bulan Oktober. Jadi sawah tidak ada istirahatnya. Dimanfaatkan terus." (Hasil wawancara dengan pak Suyono selaku masyarakat petani di desa Rumpuk pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Secara rinci, petugas penyuluh lapangan desa Rumpuk menjelaskan pada hasil wawancara berikut:

"Kalau di desa Rumpuk ini tanaman pangan yang dikembangkan itu padi, kedelai, jagung, dan kangkung biji. Kondisi tanahnya mendukung, jenisnya grumusol. Jadi musim tanamnya bergantian. Iya pakai air hujan, namanya sawah tadah hujan. Kalau musim kemarau hanya jagung dan kangkung saja yang ditanam. Airnya ya dari sumur bor mbak jadi ya dicampur pupuk nanti lalu dikocor. Kalau jagung dan kangkung ya tidak butuh banyak air, sedikit aja. Pupuk dan pestisidanya sudah sebagian berjalan menggunakan organik. Ya terbuat dari kotoran ternak pupuknya, dicampur sama sekam atau kulit padi. Nanti sekamnya juga bisa jadi pakan ternak jadi muter terus. Kangkung juga bijinya dijual lagi, lalu seresahnya dimakan ternak juga. Masyarakat desa Rumpuk itu MAPAN BENER mbak. Atau mandiri pangan dan bioenergi. Ya walaupun gak banyak yang beternak tapi untuk kotoran ternaknya sudah dimanfaatkan sebagai biogas. Sebenarnya SAPARI MAPAN BENER, tapi desa Rumpuk belum sampai pengembangan ke desa pariwisata. Jadi itu program pemerintah Jatim agar masyarakat dapat mandiri pangan dan bioenergi. Ya betul, kalau penyuluhan ada materi tentang pengolahan limbah." (Hasil wawancara dengan pak Agus selaku PPL Desa Rumpuk pada hari Selasa, 19 Maret 2019)



Gambar 4.11. Tanah Pertanian desa Rumpuk Sumber: Dokumentasi Narasumber (PPL Desa Rumpuk), 2019

Selanjutnya PPL desa Rumpuk juga menjelaskan secara lengkap pemakaian pestisida dan pupuk pada pertanian di desa Rumpuk sebagai berikut:

" Semua pupuk baik organik maupun kimia tetap mengandung unsur kimia yaitu unsur N, P, K, S. Ca, Mg, Cl, Zn, Fe, Mn, Mo dan sebagainya. Jadi unsur hara itu ada yang esensial dan non esensial untuk tanaman. Unsur kimia itulah yang diserap tanaman dalam bentuk ion-ion. Menurun atau meningkat pemakaian pupuk dan pestisida itu tergantung cuaca, serangan hama-penyakitnya. Pupuknya tetap karena tingkat kesuburan tanahnya cenderung tetap Petroganik itu pupuk yg dari bahan2 organik/kotoran ternak (pupuk organik). Sedang yang urea dan phonska itu pupuk kimia. Kalau dilihat dari disiplin ilmu kimia, semua yang diserap tanaman adalah unsur kimia walaupun pupuknya itu pupuk organik. Oleh para ahli dijelaskan bahwa intinya tidak ada tanaman oranik, beras organik ataupun yang berembel-embel organik lainnya. Adanya adalah TANAMAN SEHAT, AMAN, TOYYIB artinya tanaman yang hasilnya dikonsumsi manusia tidak menyebabkan termakannya residu/sisa zat berbahaya terhadap tubuh. Intinya kandungan bahan berbahaya masih dibawah ambang batas aturan kesehatan terutama oleh institusi terkait misal badan POM dan WHO. Sedangkan tahun ini penggunaan pestisida kimia menuru drastis, penggunaan hampir 5-10% karena tanaman semuanya sehat."

Tabel 4.6. Penggunaan Pupuk pada Pertanian desa Rumpuk

\	Dosis	Waktu dan Takaran Pupuk (kg/ha)					
Jenis Pupuk	(kg/ha)	Dasar	15-20 HST	30-35 HST			
Petroganik	500	500	- //	-			
Phonska	300	150	150	-			
Urea	200	50	50	100			
Jumlah	1000	700	200	100			
Jumlah Hara N-P-K	137-45-45	45,5-22,5-22,5	45,5-22,5-22,5	46-0-0			

Sumber: UPT Dinas Pertanian Mantup, 2019

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah desa Rumpuk adalah tanah grumosol yang cocok untuk ditanami padi, jagung, dan kedelai. Selain itu masrayakat desa Rumpuk juga menanam kangkung biji. 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan

a. Rekruitmen

Dalam proses menjalankan suatu organisasi tentunya tidak terlepas dari proses rekruitmen anggota dan pengurus organisasi tersebut. Berikut pendapat dari Kepala Bidang PSDM Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan menganai rekruitmen pada Gapoktan :

"Kalau rekrutmen pengurus Gapoktan, kita itu hanya ikut saja, soalnya sudah dibentuk oleh mereka kan Gapoktan kumpulan dari Poktan-Poktan, untuk sistemnya juga mereka yang melakukan sesuai dengan apa yang ada di AD/ART. Kualifikasi pengurusnya juga tidak ada, biasanya yang jadi panutan di sana, petani maju, berpengaruh pada masyarakat sekitar, punya ketrampilan dan kemampuan untuk memimpin, komunikasinya bagus. Umumnya ketua, bendahara dan sekeretaris, untuk kelengkapannya dipilih mereka sendiri. Tugas Dinas ya hanya mengawasi." (Hasil wawancara dengan Bapak Sukadi selaku Kepala Bidang PSDM Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan pada hari Senin, 18 Maret 2019)

BRAWIJAYA

Sedangkan pada saat rekruitmen, perangkat desa Rumpuk juga berperan dalam hal pengawasan. Proses rekruitmen penting sebagai pendukung untuk mendapatkan pengurus yang berkemampuan. Hal ini dijelaskan oleh kepala desa Rumpuk sebagai berikut :

"Kalau terkait rekrutmen kepengurusan, saya juga ikut, sekitar tahun 2010an itu, begitu dana uang cair, kita membentuk panitia Gapoktan. Kadernya dipilih kepala dusunnya, mbak. Lalu musyawarah untuk memutuskan mana yang terbaik. Alhamdulillah pengurusnya bagus-bagus, tidak ada masalah terkait Gapoktan. Semuanya lancar. Masyarakat juga percaya. Uang PUAP juga aman". (Hasil wawancara dengan pak Samin selaku Kepala Desa Rumpuk pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019)

Sependapat dengan hal tersebut, salah satu pertani di desa Rumpuk juga menyatakan bahwa pengurus yang telah terpilih di Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun memiliki kemampuan yang baik, sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Pengurus yang bertugas sudah bagus mbak, selama ini tidak pernah ada masalah di sini. Lancar-lancar saja. Iya betul bisa mendukung pertanian disini. Aktif juga menggerakkan masyarakat." (Hasil wawancara dengan pak Abdul Shomad selaku masyarakat petani di desa Rumpuk pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Sejalan pernyataan tersebut, Petugas Penyuluh Lapangan Gabungan Kelompok Tani Desa Rumpuk yang menyatakan bahwa pembentukan pengurus dan anggota Gapoktan berlandaskan aturan perundangan yang dipilih secara musyawarah, pengurus yang bertugas juga dipercaya masyarakat. Namun hal ini menciptakan sebuah hambatan tersediri karena tidak adanya pergantian pengurus, seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara berikut:

"Lembaga Kelompok Tani dalam hal definisi secara aturan perundangan, siapa saja yang punya komitmen sama dalam memajukan

Sependapat dengan hal tersebut Bu Sunarti selaku bendahara Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun menyatakan bahwa kepala dusun dan kepala desa juga turut serta dalam jalannya pemilihan pengurus Gapoktan. Pemilihan dilakukan lima tahunan, namun pada Gapoktan Podo Rukun Desa Rumpuk hanya dilakukan sekali saja dan diteruskan oleh pengurus yang sama pada tahun-tahun berikutnya karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengurus yang menjabat, seperti hasil wawancara sebagai berikut:

"Di sini ada 3 dusun: Tawangsari, Rumpuk dan Sumberjuwet, kita kemudian ke kepala dusun, kita minta saran, siapa nanti yang jadi pengurus, dan itu 5 tahunan kita laksanakan, tapi kok masih *pancet* seperti itu, waktu pemilhan ya itu lagi, sebetulnya kan ganti ya agar ada pembaruan jadi tidak ini-ini saja, tapi ya masyarakat gitu, kalau gonta-ganti gak berjalan katanya. Iya jadi kepala dusun dulu, terus nanti masyarakat milih siapa nanti yang bisa menjadi pengurus dan bisa berperan aktif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan untuk sistemnya kita selalu musyawarah.". (Hasil wawancara dengan Bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun Desa Rumpuk pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019)

Dengan demikian, dari hasil beberapa wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pemilihan pengurus Gapoktan dipilih berdasarkan musyawarah bersama untuk memilih pengurus yang didampingi oleh perangkat desa dan disaksikan oleh Petugas Penyuluh Lapangan UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup. Pengurus Gapoktan terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Untuk pemilihan pengurus dan anggota juga didasarkan pada tata cara

BRAWIJAYA

b. Sarana

Dalam upaya menciptakan pertanian berkelanjutan tentunya sarana juga menjadi penunjang keberhasilan. Salah satu pendukung berupa sarana adalah dengan adanya bantuan berupa saprodi dan alsintan dari pemerintah, sebagai mana hasil wawancara berikut ini:

"Partisipsi masyarakat juga sangat antusias terkait bantuan apapun yang telah diberikan oleh pemerintah, baik handtraktor, pupuk dan lain-lain, jadi petani tuh merasa terbantu dengan bantuan ini. Ya betul, bantuannya terkait Saprodi dan Alsintan. Terbantu sekali mbak. Jadi tidak banyak pengeluaran, alat yang dibutuhkan juga tersedia. Hasil panen alhamdulillah cukup mbak." (Hasil wawancara dengan pak Suyono selaku masyarakat petani di desa Rumpuk pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Sependapat dengan hal tersebut, petani desa Rumpuk lainnya juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut:

Bantuan yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa sarana penting untuk menunjang keberhasilan pertanian, sehingga tidak adanya sarana tertentu juga merupakan suatu hambatan terendiri bagi masyarakat maupun pengurus Gapoktan. Salah satu penghambat kegiatan Gabungan Kelompok Tani yaitu kurangnya sarana yang memadahi, seperti yang dinyatakan pada hasil wawancara berikut:

"Untuk rapat tidak ada gedung, sehingga numpang-numpang juga, sehingga diharapkan pemerintah juga memberikan fasilitas rapat untuk petani sehingga lebih maju, profesional dan memiliki integritas bagus. Termasuk agar ada tempat berkas-berkas biar gak kesana kemari, kita mau rapat gotong-gotong, kadang dua kali balik lagi, nah kalau ada tempat berkas kan enak dan kita bisa bekerja lebih aman. Jadi kedepannya jika punya tempat sendiri dan terpampang gedung dan sudah ada namanya akan lebih aktif lagi dan juga kepengurusan seneng dan anggota seneng". (Hasil wawancara dengan bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Menurut kepala desa Rumpuk, penyediaan tempat untuk kantor Gapoktan tetap diusahakan dan menunggu perizinan sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Iya inginnya gedung ini (di balai desa) bisa buat Gapoktan, soalnya sekarang masih menunggu ada izin". (Hasil wawancara dengan pak Samin selaku Kepala Desa Rumpuk pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019)

BRAWIJAYA

BRAWIJAYA

Salah satu cara untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah dijelaskan oleh PPL desa Rumpuk sebagi berikut:

"Fasilitasi dari pemerintah untuk Gapoktan untuk memudahkan pengembangan dapat melalui musyawarah dan rencana pengembangan desa (musrenbangdes) lalu kecamatan selanjutnya baru ke pemerintah. Ditinjau dulu prioritasnya." (Hasil wawancara dengan pak Agus selaku PPL Desa Rumpuk pada hari Selasa, 19 Maret 2019)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Gapoktan Podo Rukun, Desa Rumpuk adanya sarana yang memadahi penting bagi keberlangsungan pertanian mereka. Sarana endukung kegiatan bercocok tanam dengan adaPenghambat dalam menjalankan organisasinya adalah karena tidak ada sarana dan prasarana yang menjadi wadah untuk para pengurus dan anggota melakukan tugas-tugas mereka seperti proses pelatihan dan pembinaan serta rapat maupun musyawarah. Selain itu, tidak adanya gedung atau kantor khusus Gapoktan membuat pengurus kesusahan dalam penyimpanan berkas-berkas kepengurusan. Oleh sebab itu izin pemerintah diperlukan dan dapat melalui musrenbangdes.

c. Jejaring Kemitraan

Salah satu tujuan pembentukan Gapoktan adalah untuk menjamin produktivitas yang kontinu maka kemitraan dalam organisasi Gapoktan merupakan unsur yang penting karena untuk efisiensi usaha dalam hal peningkatan produktivitas padi dan pemasaran padi dengan pelaku usaha. Namun pada Gapoktan Podo Rukun desa Rumpuk tidak ada kemitraan yang terjalin, seperti hasil wawancara sebagai berikut:

"Belum ada kemitraan, soalnya pedagangnya ya orang sini juga masihan, jadi gak kesusahan kalau jual, harga juga ya masih wajar juga, tapi kalau mitra yang pakai MOU itu belum ada. Saya juga pengen itu di Lamongan itu dilatih kalau bisa itu panen itu diolah disini berasnya kita setor di Bulog, tetapi yang sudah pernah itu kok prosesnya di Bulog itu kok rada sulit gitu, jadi kayaknya gak ada yang mau, jadi disini tuh sudah ada slep buat padi juga sudah ada, lumbung pangan juga ada, tapi yaitu untuk ke arah kesitu belum ada yang mampu. Masih sekedar pengen dan belum bisa melaksanakan. Sebetulnya memangnya harus seperti itu (bermitra) tetapi belum ada untuk pengolahan produksi dari petani belum ada ". (Hasil wawancara dengan bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun pada hari Rabu, 20 Maret 2019)



Gambar 4.12. Pengisian Lumbung oleh salah satu poktan di desa Rumpuk

Sumber: Dokumentasi narasumber (PPL), 2019



Gambar 4.13. Penimbangan Hasil Panen Sumber: dokumentasi narasumber (PPL), 2019

Sependapat dengan hasil wawancara di atas, hal serpa juga dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

"Menjual ke pengurus yang juga pedagang tidak mitra resmi juga. Tapi permodalan dan distribusi hasil panen yang tidak memiliki mitra juga termasuk kendala. Karena kontinuitas (selalu ada), kuantitas (jumlah) dan harga standar sana yang berbeda (great A). Kadang petani juga tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan". (Hasil wawancara dengan pak Agus selaku PPL Desa Rumpuk pada hari Selasa, 19 Maret 2019)

Selanjutnya salah satu petani anggota Gapoktan Podo Rukun menjelaskan bahwa kualitas bibit bantuan dari pemerintah menyebabkan produksi juga yang kurang bagus, sebagaimana berikut:

"Jadi kita kan dapat bantuan dari pemerintah, ya kita seneng, tapi bantuannya itu ya kurang bagus pas pembibitan. Jadi ya kalau bisa diusulkan dari mbak kalau mau memberi bantuan kepada kelompok tani itu harus yang sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu loh mbak, karena bantuan dari pemerintah itu kadang-kadang tidak sesuai. Mutunya juga kurang bagus, tapi kan, memang petani itu inginnya tuh pengen produksinya lebih banyak jadi ya beli sendiri yang bagus gitu. Jadi permasalahannya disini itu dari benih bantuannya itu ya yang kurang bagus, kita juga seneng dapat, tapi ya produksinya itu kurang bagus, tapi ya karena petani itu pengennya produksinya lebih banyak yaitu beli sendiri". (Hasil wawancara dengan pak Sardjo selaku masyarakat petani di desa Rumpuk pada hari Rabu, 20 Maret 2019)

Akan tetapi, tidak adanya kemitraan dengan pelaku usaha dengan sekala besar merupakan faktor pendukung keberlanjutan pertanian itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam hasil wawancara berikut:

"Kemitraannya disini bermitra dengan masyarakat setempat saja, jadi gak sampai kerjasama mitra dari orang luar, karena memang belum perlu, cukup untuk makan penduduk sini. Jadi memenuhi kebutuhan penduduk desa Rumpuk saja. Pertanian disini mendukung penduduk setempat." (Hasil wawancara dengan pak Samin selaku Kepala Desa Rumpuk pada hari kamis tanggal 21 Maret 2019)

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan salah satu faktor penghambat sekaligus pendukung dalam mewujudkan kontinuitas pertanian yaitu tidak adanya jejaring kemitraan yang resmi, masyarakat hanya menjual ke pedagang setempat saja. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang belum mampu memenuhi kualitas dan kuantitas yang diminta oleh mitra kerja dikarenakan kualitas bibit yang kurang baik, penyebab l ain yaitu harga yang kurang sesuai dengan keinginan petani. Sedangkan hasil panen cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa Rumpuk saja, sehingga dapat dikatakan mandiri pangan dan keberlanjutan itu sendiri sedang berlangsung.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable

Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan

a. Dimensi Ekonomi

Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani (Syahyuti, 2007:15-35). Berdasarkan hasil penelitian, Gapoktan Podo Rukun sebagai salah satu Gapoktan yang menerima dana PUAP sangat terbantu dengan adanya dana tersebut. Kementerian Pertanian mulai tahun 2008 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. Sasaran PUAP yaitu berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi Didasarkan pada prinsip-prinsip penumbuhan Gabungan kelompoktani pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan kelompoktani, adapun sistem insentif dari pengembangan kapasitas gapoktan dapat dianalisa menurut prinsip dasar penumbuhan gabungan kelompok tani yaitu kesukarelaan dan keswakarsaan. Gapoktan Podo Rukun merupakan organisasi yang dikelola secara swakelola/swadaya, sehingga dalam kepengurusan Gapoktan tersebut tidak ada upah atau insentif dari pemerintah. Namun, terdapat uang jasa untuk pengurusnya, yang biasa disebut masyarakat setempat dengan uang lelah, yang diambil dari kas hasil dari pengembangan dana PUAP. Jumlah uang lelah sesuai kesepakatan secukupnya saja dan tidak menghamburkan dana yang dipunya sebagai kas.

Selain itu sesuai dengan pendapat berikut bahwa insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang

ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi (Gorda, 2004:141). Sedangkan, Manullang (2003:147) menyatakan, insentif merupakan sarana motivasi/sarana yang menimbulkan dorongan. Jadi, uang lelah untuk pengurus Gapoktan Podo Rukun bertujuan untuk memotivasi mereka agar dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, selain itu uang lelah tersebut wujud dari reward atau penghargaan atas dedikasi para pemgurus dalam membantu para petani di desa Rumpuk untuk memajukan pertanian mereka. Sesuai dengan permentan nomor 82 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan Gapoktan, Gapoktan yaitu lembaga yang dibentuk dengan prinsip sukarela dan swakarsa. Kesukarelaan, artinya keanggotaan Gapoktan Podo Rukun bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa dijanjikan bahwa akan adanya upah atau imbalan yang akan diberikan kepada setiap pengurus nantinya. Kemudian keswakarsaan, artinya bahwa penumbuhan Gapoktan didasarkan atas kemauan dan inisitaif para anggota kelompoktani yang tergabung. Sehingga adapun uang lelah yang ada dalam Gapoktan Podo Rukun adalah inisiatif atau kemauan dari pengurus dan anggota sendiri atas keputusan bersama atau musyawarah dan jumlahnya ditentukan pula atas kesepakatan bersama agar tidak banyak memangkas kas yang dimiliki, hanya secukupnya sebagai wujud penghargaan atas kerja keras dalam kegiatan Gapoktan Podo Rukun termasuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyakatan memiliki inisiatif dan kemandirian untuk mengelola keuangan mereka dalam bidang pertanian dan untuk pemenuhan kebutuhan.

Menurut Munasinghe (1993) dimensi ekonomi berkaitan dengani salah satunya adalah stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang ataupun mendatang. Dari uraian analisa penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara ekonomi, masyarakat petani desa Rumpuk telah mengusahakan kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan. Pertanian masyarakat desa Rumpuk berkembang serta meningkatkan kesejahteraan petani karena secara finansial mereka dapat mengelola secara mandiri kebutuhan, pengeluaran, dan pendapatan mereka, terbukti dengan jumlahnya uang kas yang dimiliki hingga tiga ratus juta rupiah hingga uang tersebut sebagiannya dimanfaatkan untuk pembuatan jalan antar sawah. Gapoktan Podo Rukun sebagai lembaga penjembatan, menjadi wadah para petani dalam proses pengelolaan dana tersebut dan sebagai sarana penghubung antara warga dengan pemerintah. Dalam hal permodalan dan peningkatan usaha pertanian, masyarakat untuk saat ini dan waktu yang akan datang tidak dalam kondisi rawan, karena dana yang dapat dipinjam untuk diputar dalam kegiatan agribisnis pertanian tersedia di koperasi simpan pinjam pertanian desa Rumpuk yang berada dalam naungan Gapoktan Podo Rukun.

b. Dimensi Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, Gapoktan Podo Rukun sebagai organisasi yang memiliki tujuan juga telah berusaha menumbuhkembangkan dan memelihara komitmen bersama dalam hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Setiap Soeprapto (2006;20) mengatakan bahwa komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi sangat menentukan sejauh mana pembangunan akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Komitmen bersama yang terjalin pada gapoktan Podo Rukun berazaskan pada kekeluargaan. Selain itu, adanya kesepakatan diputuskan secara bersama-sama dalam melaksanakan tugas organisasi. Komitmen juga tercipta dari keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perhatiannya kepada gapoktan melalui PPL, pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat petani dengan mengadakan LAKU yang rutin, dan memberikan konsultasi kepada permasalahan yang terjadi pada gapoktan serta memberikan fasilitasi pada apa yang diinginkan gapoktan melalui modal dan bantuan.

Tanpa adanya komitmen bersama yang baik dari seluruh pihak yang

Salah satu pendukung keberhasilan menciptakann partisipasi masyarakat salah satunya adalah melalui kepemimpinan. Ketua gapoktan memiliki sikap terbuka dan perhatian terhadap permasalahan yang ada. Ketua gapoktan selalu mengkomunikasikan setiap permasalahan kepada seluruh pengurus dan anggota organisasi. Selain itu, keterbukaan yang harus dimiliki adalah mengusahakan agar selalu melaporkan keuangan Gapoktan secara periodik kepada Petugas Penyuluh Lapangan sebagai perwakilan dari pemerintah. Selain keterbukaan, hal tersebut mencerminkan bahwa terdapat sikap tanggung jawab yang dimiliki pak Selamet selaku ketua Gapoktan yang menggerakkan pengurus dan mengingatkan petani agar mengembalikan uang pinjaman secara tepat waktu.

Pada Gapoktan Podo Rukun desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, dengan memiliki jiwa kepemimpinan disertai kemauan dan kejujuran, maka seluruh anggota organisasi akan termotivasi dengan perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpinnya. Dampak yang diciptakan dari kepemimpinan yang

Organisasi secara terus menerus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus meningkatkan kemampuannya yang selaras dengan tuntutan-tuntutan perubahan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan diarahkan untuk memperkokoh kemampuan adaptasinya. Pendidikan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas petani. Petani sebagai salah satu pelaku utama pembangunan pertanian memerlukan kemampuan yang memadai tentang pengetahuan, sikap maupun keterampilan untuk mengantisipasi berbagai perubahan strategis baik ditingkat lapang, nasional, maupun internasional. Petani memerlukan penyesuaian substansi materi penyuluhan untuk mengantisipasi adanya perubahan baik karena perubahan sumber daya alam maupun sosial.

Pada pasal 46 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani. Dijelaskan bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa. Sesuai dengan hasil yang di dapat dari lapangan, bahwa terdapat penyuluhan serta pembinaan terhadap Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun desa Rumpuk oleh pemerintah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, yang kemudian pembinaan dan pelatihan mengenai pertanian dilaksanakan oleh seseorang Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk satu desa. Dalam rangka

melaksanakan tugasnya sebagai pembina pada Gapoktan, cara kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam memberikan pelatihan dan pembinaan lebih ditujukan pada sistem latihan dan kunjungan (LAKU). Adapun kegiatan penyuluhan didasarkan pada pembinaan yang sifatnya rutin dan insidental.pelatihan dilakukan 2-3 kali dalam satu tahun yang mencakup bagaimana mengolah hasil pertanian warga. Selain dilatih, anggota dan pengurus Gapoktan juga dibina untuk meningkatkan motivasi mereka, hal ini dikarenakan Gapoktan Podo Rukun merupakan Gapoktan kelas lanjut yang masih perlu meningkatkan lagi motivasi untuk berinovasi.

Berdasarkan pada UU Nomor 19 tahun 2013 pasal 46 ayat 4 dikatakan bahwa penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik.
- 2. Analisis kelayakan usaha.
- 3. Kemitraan dengan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, pelatihan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran tersebut terbukti dengan adanya latihan dan kunjungan yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman petani terkait pola tanam dan lain sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara menyatakan bahwa dengan adanya LAKU maka petani langsung bisa mendapatkan praktek dan pembelajaran langsung oleh para penyuluh di lapangan. Para petani yang tergabung dalam keanggotaan Gapoktan langsung mendapat konsultasi terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Selain itu, untuk analisis kelayakan usaha, Gapoktan Podo Rukun telah menerapkan fungsi dari terbentuknya gapoktan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan gapoktan yang terbagi dalam beberapa unit-unit usaha, antara lain: Unit Usaha Saprodi dan Alsintan, Unit Usaha Pemasaran Hasil Pertanian, Unit Usaha Jasa Keuangan (LKMA), dan Unit Usaha Cadangan Pangan .

Sedangkan, untuk materi yang berkaitan dengan sasaran ketiga yaitu kemitraan dengan pelaku usaha pembinaan yang diberikan masih kurang, sejalan dengan itu Gapoktan Podo Rukun juga belum menjalin kemitraan dengan pihak lain. Menurut analisa penulis dari hasil wawancara yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan petani tentang pentingnya jejaring kemitraan untuk keberlanjutan pertanian sehingga materi penyuluhan tentang kemitraan perlu diberikan.

Menurut Munasinghe (1993) dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial, indikatornya adalah partisipasi sosial dan stabilitas sosial yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat desa Rumpuk dapat dikatakan sejahtera dalam aspek sosial karena pertanian yang berkelanjutan. Dalam hal ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat dan komitmen bersama masyarakat yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan ketua dan jajaran pengurus Gapoktan Podo Rukun yang jujur dan tanggap, serta peran kepala desa yang aktif mendukung kegiatan pertanian di desa Rumpuk. Selain itu peran dari petugas penyuluh lapangan yang berperan aktif dalam memberikan konsultasi terhadap

permasalahan yang petani hadapi juga berperan penting dalam menciptakan aspek sosial yang baik, terbukti dengan adanya LAKU (latihan dan kunjungan) yang dilakukan oleh PPL, selain itu masyarakat petani juga diberdayakan melalui pelatihan dan pembinaan yang diberikan untuk dapat mengatasi permasalahan terkait penanaman hingga pemanenan dan pengelolaan dana PUAP.

c. Dimensi Lingkungan

Pada pembangunan pertanian berkelanjutan, aspek lingkungan menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan karena sumber daya alam yang terbatas dan pemakaian yang terus-menerus mengingat sektor pertanian adalah sektor yang. Menurut Kementian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource. Pada pertanian desa Rumpuk dapat dikatakan telah memenuhi tiga kriteria tersebut.

Kriteria pertama adalah tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan air pada pertanian yang tidak menggunakan banyak air dari sumur bor karena sumber daya yang dimiliki sudah mencukupi yaitu melalui sawah tadah hujan. Pemanfaatan air dari sumur bor hanya pada saat kemarau saja dan penggunaannya tidak banyak untuk pengairan tanaman kangkung biji. Tanah yang dipakai untuk bertani juga merupakan tanah yang berjenis grumusol. Tanah grumusol adalah tanah bertekstur lempung, meskipun memiliki unsur hara yang rendah tanah

Kriteria yang kedua dan ketiga adalah tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya serta meningkatkan useable resource dan replaceable resource. Dalam hal ini, melalui Gapoktan, para petani dan peternak diajarkan untuk memanfaatkan limbah dari pertanian dan peternakan mereka. Limbah pertanian berupa kulit padi atau sekam dijadikan untuk bahan pembuatan pupuk kompos dan pakan ternak, kemudian limbah atau kotoran ternak dijadikan untuk biogas dan pupuk organik. Dalam hal ini, kegiatan siklus ekosistem berjalan sehingga dapat meminimalisir polusi akibat limbah pertanian juga dapat menambah nilai guna limbah tersebut. Selain itu usaha pemakaian pestisida nabati juga memberikan manfaat yang baik bagi lingkungan. Telah diketahui meskipun pestisida dapat meningkatkan hasil pertanian, namun pestisida juga menghasilkan dampak buruk baik bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Zat kimia yang disemprotkan ke tanaman dapat menjangkau tempat selain yang tidakseharusnya menjadi target, seperti perairan, udara, makanan, dan tanah. Oleh karena itu penggunaan pestisida nabati yang berasal dari beberapa jenis tumbuhan dapat berdampak baik bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Menurut Munasinghe (1993) dimensi lingkungan alam menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif Sustainable Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan

a. Rekruitmen

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 82 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan kelompoktani dan gapoktan dikatakan bahwa ketentuan untuk membentuk gabungan kelompoktani adalah salah satunya harus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara serta seksi unit usaha dalam Gapoktan. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembentukan pengurus-pengurus untuk mengisi bidang-bidang yang ada dalam organisasi. Namun demikian, untuk menjadi pengurus gapoktan harus melewati proses seleksi dan rekruitmen yang telah ditetapkan. Syarat-syarat menjadi anggota gabungan kelompok tani adalah:

- 1. Petani atau pelaku utama pertanian harus tercatat menjadi anggota kelompok tani di tingkat dusun
- 2. Petani atau pelaku utama pertanian sanggup mentaati peraturan di dalam Lembaga Gapoktan Podo Rukun

BRAWIJAYA

3. Petani atau pelaku utama pertanian yang berusia sedikitnya 20 tahun atau sudah menikah dan mengerti tentang pertanian. (AD/ART Gapoktan Podo Rukun)

Sedangkan untuk menjadi pengurus gabungan kelompok tani ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Pengurus Gapoktan Podo Rukun dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah anggota yang disetujui oleh Kepala desa dan mengetahui Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan.
- 2. Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib musyawarah anggota.
- 3. Jabatan pengurus Gapoktan dapat merangkap pengurus Kelompok Tani atau jabatan pengurus pada instansi lain, tetapi dilarang menjabat pekerjaan didalam pemerintahan yang dibuktikan KTP
- 4. Pengurus harus mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terjadap perjuangan anggota serta mau mengabdikan diri pada bidang pertanian. (AD/ART Gapoktan Podo Rukun)

Persayaratan-persyaratan tersebut telah sesuai dengan proses rekruitmen gabungan kelompok tani yang dilakukan oleh masyarakat desa Rumpuk, bahwa anggota yang tergabung dalam gapoktan berasal dari para petani yang memiliki keinginan bersama untuk memajukan pertanian mereka, memiliki lahan pertanian, berusia minimal 20 tahun dan sudah tergabung sebagai anggota poktan dapat bergabung dengan Gapoktan. Pemilihannya yang pertama dipilih oleh kepala dusun, kepala dusun memilih kandidat dari kelompok tani. Menurut Simamora (2004) pada umumnya dapat dirangkum dalam berbagai kategori, yaitu: pendidikan, pengalaman kerja, tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerja, pusat pelatihan, biodata, dan refrensi. Namun, pada hasil yang didapatkan di lapangan tidak ada spesifikasi khusus dalam persyaratan menjadi pengurus Gapoktan Podo Rukun. Menurut masyarakat dan PPL desa Rumpuk, pemilihan pengurus gapoktan tidak didasarkan pada tingkat pendidikan personal, melainkan

menurut kemauan dan sikap personal. Kriterianya yang utama adalah kemauan, selanjutnya kemampuan yang meliputi kepemimpinan dan kejujuran. Setelah calon pengurus yang dipilih oleh kepala dusun terkumpul, selanjutnya diadakan musyawarah. Musyawarah tersebut dihadiri kepala dusun, kepala desa, dan PPL sebagai perwakilan dari UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup. Dalam pemilihannya, sudah sesuai dengan AD/ART Gapoktan Podo Rukun bahwa musyawarah dalam mengambil keputusan bersama harus dinyatakan memenuhi kuorum apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.

Pada Gapoktan Podo Rukun proses rekruitmen adalah kegiatan yang tepat untuk memperoleh pengurus yang berkapasitas dan dapat dipercaya. Pengurus yang menjabat saat ini adalah pengurus yang pertama kali dibentuk sehingga tidak ada pergantian dan pemilihan ulang. Menurut Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2011) beberapa syarat organisasi adalah:

- 1. Adanya pendiri sebagai pemrakarsa terbentuknya suatu wadah organisasi tertentu;
- 2. Mempunyai anggota yang jelas, dimana para pemrakarsa biasanya sekaligus juga sebagai anggota organisasi yang bersangkutan;
- 3. Mempunyai landasan hukum internal organisasi, sebagai aturan main menjalankan organisasi yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/ART) organisasi;
- 4. Adanya kepengurusan organisasi dan job description yang jelas;
- 5. Mempunyai arah kebijakan dan program kerja yang jelas, yang berlandaskan pada visi dan misi guna mencapai tujuan organisasi;
- 6. Mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas, yang berlandaskan pada aspek moralitas, loyalitas, integritas, tanggung jawab, dan prestasi. (Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011)

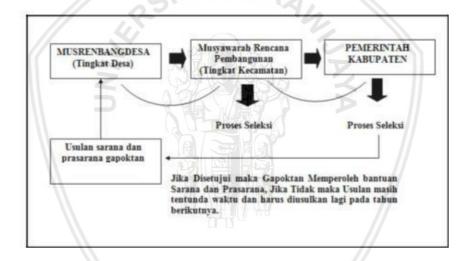
Dalam poin ke enam, yaitu sebuah organisasi disyaratkan untuk mempunyai sistim kaderisasi dan regenerasi yang jelas berlandaskan aspek moralitas, loyalitas, integritas tanggung jawab dan prestasi, kepengurusan Gapoktan Podo Rukun pada kenyataannya tidak menjalankan proses pemilihan pengurus secara periodik dan tidak adanya regenerasi pengurus. Hal tersebut karena masyarakat telah mempercayai kinerja para pengurus dalam menciptakan komitmen bersama yang baik dan bertanggung jawab terhadap dana yang telah diberikan sebagai modal untuk dikembangkan yaitu PUAP. Menurut poin ke-enam tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pengurus Gapoktan Podo Rukun telah memenuhi beberapa aspek yaitu moralitas, loyalitas, integritas dan tanggung jawab, sedangkan outcome berupa prestasi belum secara signifikan ditunjukkan, hal ini menyangkut Gapoktan Podo Rukun adalah Gapoktan kelas lanjut yang mana masih perlu meningkatkan inovasinya agar dapat menciptakan pembaharuan dan prestasi lagi. Sehingga, dibalik kepercayaan masyarakat tersebut seharusnya rekruitmen dilakukan 5 tahun sekali agar terdapat regenerasi. Bahwasanya regenerasi pengurus juga perlu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan kemungkinan yang akan datang di masa yang akan datang. Selain itu regenerasi pengurus perlu dilakukan agar terciptanya ide-ide baru atau inovasi terhadap Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun.

b. Sarana

Menurut Siwu, dkk (2018) salah satu program yang telah di luncurkan oleh pemerintah di bidang hortikultura kepada petani adalah program bantuan sarana produksi pertanian. Sarana produksi pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian. Sarana produksi berperan penting di dalam usaha mencapai produksi sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pentingnya sarana dalam suatu kegiatan pertanian, selain dapat mendukung pertanian tersebut jika sarana terpenuhi, maka dapat jadi penghambat pula ketika tidak tersedia. Salah satu sarana yang perlu dimiliki Gapoktan Podo Rukun adalah gedung atau kantor untuk pertemuan atau untuk menyimpan berkas-berkas kepengurusan maupun keanggotaan. Menurut hasil wawancara, gedung atau kantor Gapoktan diperlukan untuk menjadi penunjang peningkatan integritas pengurus Gapoktan. Desa Rumpuk sendiri terdapat tiga dusun, adanya kantor Gapoktan di dusun Rumpuk sendiri dimaksudkan agar setiap rapat atau pertemuan termudahkan karena berada di titik tengah-tengah. Namun demikian, kepala desa sendiri tidak tinggal diam. Desa Rumpuk sendiri memiliki balai desa

yang mana disamping balai tersebut terdapat gedung-gedung atau kantor minimalis yang dapat dijadikan kantor Gapoktan. Dalam mewujudkannya tentunya harus ada dana anggaran dan izin dari pemerintah. Untuk itu salah usaha yang dapat dilakukan yaitu melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Menurut UU No 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 21 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rang menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.



Gambar 4.14. Alur pengajuan permintaan usulan sarana kepada pemerintah melalui Musrenbangdes

Sumber: ilustrasi oleh penulis dari hasil wawancara, 2019

Dari penjelasan Pak Agus selaku PPL proses pengajuan permintaan fasilitasi kepada pemerintah dapat dilakukan melalui musrenbangdes yang kemudian musyawarah di tingkat kecamatan yang kemudian baru disampaikan kepada pemerintah. Permintaan masih perlu melalui tahapan seleksi yang mana untuk diketahui skala prioritasnya untuk segera disetujui oleh pemerintah atau

tidak. Dengan demikian sarana yang belum terpenuhi dapat dilakukan dengan alur tersebut.

c. Jejaring Kemitraan

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 83 Tahun 2013 dikatakan bahwa salah satu prinsip dari adanya penumbuhan Gapoktan adalah untuk menjalin kemitraan. Kemitraan yang berarti bahwa penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh pertanian. Sasaran paling penting dengan adanya pembentukan Gapoktan tidak lain untuk meningkatkan perekonomian petani melalui terjalinnya kemitraan yang terbentuk.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menjalin kemitraan antara petani dan pelaku usaha masih sulit untuk dicapai. Hal ini disebabkan oleh bibit bantuan yang diterima petani tidak sesuai yang diharapkan oleh mereka, dengan kata lain kualitas bibitnya kurang baik sehingga padi dari panen yang dihasilkan juga belum memenuhi kualitas yang baik. Sedangkan menurut Robbins (2005) dalam Mustabsir (2017), penerapan sarana produksi yang baik dapat memberikan hasil yang baik bagi pertanian. Induk yang baik memberikan benih yang baik pula, pembudidayaan tanaman induk yang baik akan sangat berperan dalam penentuan hasil yang baik. Sedangkan menurut Hanani, dkk (2003), beberapa komponen terkait dengan subsistem ketersediaan pangan ini antara lain adalah diperlukannya infrastruktur pertanian berupa irigasi, sarana produksi, dan teknologi. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika petani di desa Rumpuk ingin meningkatkan

kualitas padi hasil panennya, bibit yang akan digunakan juga harus dari benih unggul yang dipilih, dengan demikian dapat menjadi masukan terhadap pemerintah agar memenuhi kualitas bibit yang diinginkan oleh petani.

Selain itu kurang sepakatnya petani dengan harga yang ditentukan oleh pihak pelaku usaha menjadi salah satu penyebab petani enggan menjual hasil panennya kepada mitra. Salah satu yang mendasar menjadi penyebab Gapoktan tidak bermitra dengan pelaku usaha adalah kurangnya pengetahuan petani tentang pentingnya kemitraan membuat mereka berfikir bahwa tidak perlu bermitra dengan pelaku usaha sehingga hasil pertanian mereka cukup dijual kepada masyarakat setempat saja. Pengetahuan petani tentang pentingnya kemitraan untuk menjamin keberlanjutan Gapoktan perlu ditambahkan. Materi tentang pentingnya kemitraan bisa ditambahkan pada saat penyuluhan.

Namun tidak adanya kemitraan juga menjadi faktor pendukung dalam upaya Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun dalam Pembangunan Pertanian berkelanjutan. Menurut Riely (1999) dalam Mustabsir (2017) ketersediaan pangan adalah adanya bahan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu wilayah baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Dari hasil penelitian yang di dapat dari lapangan, petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa Rumpuk, bahkan saat musim paceklik karena adanya lumbung pangan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat petani desa Rumpuk dapat memenuhi ketersediaan pangan secara mandiri karena tersedianya bahan pangan dalam jumlah yang cukup aman yang berasal bari produksi sendiri. Dengan kata lain wujud dari keberlanjutan itu

sendiri adalah dengan mencukupi demand atau permintaan pencukupan pangan dari masyarakat setempat sendiri dan tidak menjalin mitra dengan pelaku usaha dengan skala lebih besar, hal ini disebabkan karena tidak sesuainya kualitas yang diharapkan dan untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan desa Rumpuk.



BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*), sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan pertanian termasuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan, merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian pada negara berkembang dengan permintaan hasil pertanian berupa tanaman pangan yang tinggi. Gapoktan Podo Rukun adalah salah satu lembaga pertanian yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pertanian dengan perspektif keberkelanjutan dan juga pembangunan desa Rumpuk, yang mana dijabarkan berdasarkan hasil penelitian, dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Upaya Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun dalam Perspektif Sustainable
 Agriculture untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan
 - a. Dimensi Ekonomi
 - 1) Gapoktan Podo Rukun memanfaatkan dana yang diberikan pemerintah berupa PUAP untuk memberi modal petani dalam mengelola lahan pertanian mereka dan untuk dikembangkan, dalam hal ini Gapoktan Podo Rukun mampu secara mandiri mengelola dan mengembangkan keuangan sehingga mempunyai kas dan memanfaatkan uang kas tersebut untuk membangun desa

BRAWIJAY

- 2) dan pertanian dengan dibuatnya *galengan* atau jalan yang menghubungkan ke sawah.
- 3) Dalam hal ini Gapoktan Podo Rukun mempunyai unit usaha simpan pinjam yang disebut LKMA, yaitu sarana berupa koperasi yang menangani keuangan masyarakat petani.
- 4) Dengan demikian orientasi keberlanjutan usaha ekonomi pada pertanian desa Rumpuk dikatakan berhasil memenuhi aspek kebutuhan petani baik untuk sekarang maupun masa depan.

b. Dimensi Sosial

- Gapoktan Podo Rukun telah berusaha menumbuhkembangkan dan memelihara komitmen bersama dalam hubungan kerja yang harmonis dan kondusif hal tersebut tercipta dari pertemuan rutin.
 Setiap permasalahan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan gotong royong yang didukung oleh kepemimpinan yang baik.
- 2) Kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua Gapoktan Podo Rukun telah dianggap baik oleh bawahannya, ketua Gapoktan memiliki sikap kemauan yang tinggi, keterbukaan terhadap permasalahan yang ada, mampu menerima kritik dan jujur sehingga mendapatkan kepercayaan bawahan dan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga berperan sebagai pendukung aktif kegiatan pertanian.
- 3) Masyarakat juga diberdayakan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi tata cara mengelola lahan pertanian dan hasil

- pertanian, pembuatan pupuk organik dan biogas, pengelolaan dana PUAP, dan pembukuan oleh pengurus Gapoktan.
- 4) Pada desa Rumpuk yang sebagian besar penduduknya adalah petani, peran Gapoktan penting untuk menjaga stabilitas sosial, adanya Gapoktan yang berorientasi pada kesejahteraan petani membuat para petani dapat menyelesaikan setiap masalah yang terjadi seiring perkembangan jaman.

c. Dimensi Lingkungan

- 1) Upaya Gapoktan dalam menciptakan orientasi keberlanjutan pertanian pada dimensi keberlanjutan ekologi alam di desa Rumpuk telah diusahakan untuk menciptakan hasil panen yang aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung residu, memelihara sumber daya air dan tanah, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan dengan mulai memakai pestisida nabati dan pemakaian pestisida hanya untuk saat tertentu.
- 2) Gapoktan dilatih untuk memanfaatkan limbah pertanian dan peternakan mereka menjadi barang bernilai guna seperti pakan ternak, pupuk organik atau kompos, serta biogas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Gabungan Kelompok Tani dalam Perspektif *Sustainable Agriculture* untuk mewujudkan Desa Mandiri Pangan

a. Rekruitmen

- 1) Proses rekruitmen pengurus Gapoktan menjadi faktor pendukung pada pertanian di desa Rumpuk karena kader yang berintegritas dari setiap dusun dipilih melalui musyawarah bersama perangkat desa dan petugas penyuluh lapangan. Dalam hal ini juga didukung oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengurus.
- 2) Akan tetapi dalam penerapannya, karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengurus, Gapoktan Podo Rukun tidak pernah berganti pengurus atau regenerasi sehingga kurangnya ide dan inovasi yang tercipta untuk mengembangkan pertanian desa Rumpuk.
 Regenasi pengurus perlu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan kemungkinan yang ada di masa mendatang dan dapat menciptakan ide atau inovasi baru.

b. Sarana

- Dalam pertanian desa Rumpuk, salah satu pendukung pertaniannya adalah bantuan sarana dari pemerintah yang penting untuk memberi modal petani dalam mengelola lahan pertanian. Sarana tersebut meliputi alsintan (alat mesin pertanian) dan saprodi (sarana produksi).
- Salah satu faktor penghambat dalam menunjang peningkatan integritas pengurus dan anggota Gapoktan adalah tidak adanya gedung

pertemuan atau kantor. Pengusulan sarana tersebut dapat dilakukan dengan cara Musrenbangdes.

c. Kemitraan

- 1) Salah satu faktor penghambat pertanian desa Rumpuk belum dapat mengembangkan usaha taninya lebih luas adalah tidak adanya mitra usaha dalam skala besar atau perusahaan, padahal salah satu tujuan dalam menjalankan Gapoktan adalah mendapatkan jejaring kemitraan dalam usahatani. Namun demikian hal tersebut masih sukar untuk dibangun oleh Gapoktan Podo Rukun, sehingga pemerintah perlu memberikan solusi terkait hal tersebut.
- 2) Akan tetapi, tidak adanya mitra pelaku usaha melainkan hanya pedagang setempat menjadi faktor pendukung dalam membuat keberlanjutan itu sendiri berlangsung, karena petani masyarakat desa Rumpuk mandiri secara pangan yang mana mereka dapat memenuhi ketersediaan pangan masyarakat setempat yang berlangsung terus-menerus

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

1) Perlu ditambahkannya pengetahuan pengurus dan anggota Gapoktan tentang pentingnya menjalin kemitraan dengan pelaku usaha agar dapat

- 2) Pemerintah disarankan untuk mencari terobosan untuk meningkatkan inovasi masyarakat untuk mengelola hasil pertanian mereka dan pemasarannya misalnya adanya promosi terkait hasil atau produk yang dihasilkan oleh usahatani kepala pelaku usaha agar terjalin kemitraan.
- 3) Pemenuhan sarana berupa gedung atau kantor Gapoktan juga perlu dilakukan mengingat setiap kegiatan rapat dan penyimpanan berkas-berkas Gapoktan memerlukan tempat yang aman.

b. Bagi Gapoktan

- 1) Salah satu yang penting selain meningkatkan pengetahuan personal adalah dengan meningkatkan kemauan untuk berinovasi menciptakan ide-ide baru. Misalnya terkait pengolahan hail panen, agar menambah nilai agribisnis pedesaan dan menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompetitif seiring perkembangan zaman, hasil panen tidak dijual secara mentah namun perlu diolah menjadi sebuah produk andalan.
- 2) Melakukan regenerasi pengurus juga perlu dilakukan, agar terdapat sumber daya manusia lainnya yang mengerti dalam mengelola Gapoktan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan yang mengharuskan terjadinya pergantian pengurus.

BRAWIJAY

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kelembagaan Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Penyuluhan. 5 (1)
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementrian Pertanian.2018
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan
- Bunch, R. 1991. Dua Tongkol Jagung: Pedoman Pengembangan Pertanian Berpangkal pada Rakyat. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Dimyati, A. 2007. Pembinaan Petani dan Kelembagaan Petani. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung-Batu. Jawa Timur
- Fauzi, A. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan; teori dan aplikasi*. Gramedia Pusaka Utama: Jakarta
- Gillis, M., D.H. Perkins, M. Roemer, D.R. Snodgrass. 1992. *Economic of Development*. W. W. Nortton and Company, Inc. New York.London
- Gorda, I Gusti Ngurah. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Denpasar: Astabrata Bali bekerjasama dengan STIE Satya Dharma. Singaraja.
- Hanani, AR. Dkk. 2003. Strategi Pembangunan Pertanian (Sebuah Pemikiran Baru). Yogyakarta:Lappera Pustaka Utama
- Handayaningrat, Soewarno. 1995. Pengantar Study Administrasi dan Manajemen. Jakarta. Gunung Agung.
- Haryono, Bambang Santoso, dkk. 2012. *Capacity Building*.Malang: Universitas Brawijaya Press
- Juarini.2015. Pengelolaan sumberdaya manusia pertanian untuk menunjang kedaulatan pangan. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta
- Kementrian Hukum dan HAM. 2011. Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat
- Kementrian Lingkungan Hidup tahun 1990 tentang Pertanian Berkelanjutan
- Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan 2004

- Listyaningsih.2014. *Administrasi Pembangunan (Konsep dan Implementasi)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Manullang. 2003. Manajemen Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mindarti, Lely Indah. 2016. *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. Malang: UB Press
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative data analysis Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mosher, Arthur T. 1991. *Getting Agriculture Moving*. Frederick A. Praeger, Inc. Publishers. New York.
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian (Edisi III). Jakarta: LP3ES
- Munasinghe, M., 1993, Environmental Economics and Sustainable Development.
 World Bank Environment Paper Number 3. The World Bank. Washington D.C
- Mustabsir. 2017. Evaluasi Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar
- Nangameka. 2012. Pengaruh Keberadaan Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Usaha Tani. Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Abdurachman Saleh. Situbondo
- Nasrul, Wedy. 2012. Pengembangan Kelembagaan pertanian untuk peningkatan kapasitas petani terhadap Pembangunan Pertanian. LPPM UMSB, Vol. 3 No. 29 hal, 166-174
- Peraturan Mentri Pertanian RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Alfabeta:Bandung
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Pangan dan Pertanian Tahun 2015-2019
- Rivai, R.S.2011. Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia
- Salim, Emil. 1990. Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta
- Siagian, S.P. 2016. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm:4-5

- .2006. Filsafat Administrasi. Edisi revisi. Jakarta:Bumi Aksara
- Simamora, Henry. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE. YKPN
- Siwu, Ariyanto. 2018. Dampak Program Bantuan Sarana Produksi Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Cabai Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder. Jurnal Agri-SosioEkonomi. ISSN 1907–4298. 14 (3)
- Soeprapto, Krisdarto. 2006. Menuju SDM Berdaya. Jakarta: Alex Media.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suryana, dkk. 1990. Diversifikasi Pertanian dalam Proses Pembangunan Mempercepat Laju Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Suryono, A. 2004. Pengantar Teori Pembangunan (Edisi I). Malang:UM Press
- Sutamihardja. 2004. Perubahan Lingkungan Global. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana: IPB
- 2007. Kebijakan pengembangan gabungan kelompok Syahyuti. (gapoktan)sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan. Jurnal analisis kebijakan pertanian, Volume 5 No. 1 hlm, 15-35
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188 Tahun 2018
- Tjokrowinoto, M. 1987. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Uphoff, Norman Thomas. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 21 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- World Bank.2010. Tantangan Sektor Pertanian di Indonesia

www.bangsaonline.com (diakses tanggal 27 Oktober 2018 pukul 14.45) www.finance.detik.com (diakses tanggal 27 Oktober 2018 pukul 14.30) www.lamongankab.go.id (diakses tanggal 1 April 2019 pukul 11.45) www.loketpeta.pu.go.id (diakses tanggal 1 April 2019 pukul 12.30) www.mediaindonesia.com (diakses tanggal 27 Oktober 2018 pukul 14.50)



LAMPIRAN 1

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id. website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor: 070/525/413.207/2018

Dasa

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Menimbang : Surat dari Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 04 Oktober 2018 Nomor: 12152/UN10.F03.11.11/PN/2018 Perihal Ijin Penelitian

Memberikan rekomendasi kepada

AYU INDRIADIKA b. NIK/NIM 3524194508960002

c. Alamat Jl. Waringin RT 004 RW 002 Desa Kembangbahu Kec. Kembangbahu

Kab. Lamongan d. Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa

e. Instansi/Organisasi Universitas Brawijaya Malang Kebangsaan Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan a. Judul Proposal/Kegiatan Pengembar Pengembangan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani (Studi Pada Gapoktan dan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lamongan

b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan Penelitian/Survey/Kegiatan Administrasi Publik Penelitian/Survey/Research d. Penanggungjawab e. Anggota/Peserta AYU INDRIADIKA

f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan

25 November 2018 s/d 15 Mei 2019 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lamongan
 UPT Dinas Pertanian Kec. Mantup
 UPT Badan Penyuluhan Pertanian Kec. Mantup
 Kecamatan Mantup g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan

Dengan ketentuan

Dengan ketentuan

a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan

b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;

keamanan dan ketertipan di lokasi Perletitian surveyi Regiatan,
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 10 Oktober 2018

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN Sekretaria

Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan

Sdr. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
 Universitas Brawijaya Malang

HARI AGUS SANTA P. S.Sos, MM. Pembina Tk.I NIP. 19690815 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id. website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 10 Oktober 2018

Nomor

: 070/525.1/413.207/2018

Sifat Segera

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal

: Rekomendasi Ijin Penelitian.

Kepada

Yth. 1 Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Holtikultura dan Perkebunan

Kab. Lamongan

2. Sdr. Kepala UPT Dinas Pertanian

Kec. Mantup 3. Sdr. Camat Mantup

Menunjuk surat Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 04 Oktober 2018, Nomor : 12152/UN10.F03.11.11/PN/2018, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama AYU INDRIADIKA dengan Judul kegiatan "Pengembangan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani (Studi Pada Gapoktan dan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lamongan", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN Sekretaris,

TEMBUSAN:

Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah
Kab. Lamongan
3. Sdr. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang

HARI AGUS SANTA P. S.Sos, MM.

Pembina Tk.I NIP. 19690815 199003 1 007

BRAWIJAYA

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Dimensi Ekonomi

- a) Apakah terdapat sitem insentif bagi pengurus gapoktan?
- b) Jika ya, bagaimana pendapat Anda terkait sistem Insentif bagi pengurus gapoktan?
- c) Bagaimana pendapat Anda terkait modal/bantuan bagi gapoktan?
- d) Apakah ada program terkait modal/bantuan?
- e) Bagaimana proses modal/bantuan dijalankan?
- f) Kapan dan berapa kali modal/bantuan diberikan?
- g) Dalam bentuk apakah modal/bantuan yang diberikan?
- h) Apa manfaat modal/bantuan untuk gapoktan?
- i) Apa itu PUAP?

2. Dimensi Sosial

- a) Bagaimana kondisi kerja atau lingkungan sosial yang baik dalam suatu gapoktan?
- b) Bagaimana cara menciptakan kondisi kerja yang baik?
- c) Apa manfaat dari kondisi kerja pada gapoktan?
- d) Apa tujuan dari pelatihan dan pembinaan?
- e) Bagaimana proses pelatihan dan pembinaan gapoktan?
- f) Dimana pelatihan dan pembinaan gapoktan?
- g) Apa saja hal-hal yang perlu dilatih dan dibina?
- h) Kapan (berapa kali) pembinaan dan pelatihan dilakukan?
- i) Apakah komitmen bersama dapat mendukung gapoktan?
- j) Bagaimana komitmen bersama antara anggota dan pengurus gapoktan?
- k) Bagaimana komitmen bersama antara anggota dan pengurus gapoktan dengan PPL?
- 1) Apakah faktor kepemimpinan mendukung partisipasi masyarakat?

- m) Apa peran kepemimpinan dalam keberhasilan gapoktan?
- n) Bagaimana bentuk kepemimpinan yang baik?

1. Dimensi Lingkungan

- a) Apakah faktor alam atau lingkungan mendukung?
- b) Apa jenis tanah mendukung?
- c) Apa terdapat masalah terkait lingkungan atau lahan pertanian?
- d) Apakah memakai bahan kimia sebagai pupuk dan pestisida?
- e) Bagaimana cara mengolah limbah pertanian dan peternakan?

2. Faktor pendukung dan penghambat:

1) Rekruitmen

- a) Apa syarat dan tujuan dari rekruitmen?
- b) Siapa yang bertugas merekrut pengurus gapoktan?
- c) Bagaimana proses rekruitmen gapoktan?

2) Sarana

- a) Apakah terdapat masalah terkait sarana?
- b) Apa fungsi dari sarana tersebut?
- c) Apa dampak tidak adanya sarana tersebut?

3) Jejaring Kemitraan

- a) Apakah terdapat masalah terkait jejaring kemitraan pada gapoktan?
- b) Bagaimana menurut Anda terkait kemitraan bagi gabungan kelompok tani?
- c) Apa fungsi jejaring kemitraan bagi gapoktan?

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto saat wawancara bersama pak Agus Sutikno S.P., M.P. selaku Petugas Penyuluh Lapangan Desa Rumpuk, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan di UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup



Foto saat peneliti melakukan wawancara dengan Bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun desa Rumpuk di kediaman Bu Sunarti di dusun Sumur Juwet, desa Rumpuk, kecamatan Mantup



Foto saat peneliti melakukan wawancara dengan Bu Sunarti selaku Bendahara Gapoktan Podo Rukun desa Rumpuk di kediaman Bu Sunarti di dusun Sumur Juwet, desa Rumpuk, kecamatan Mantup



Foto Pak Agus Sutikno selaku PPL desa Rumpuk saat berbincang dengan Pak Suyono, salah satu petani di desa Rumpuk di kediaman pak Suyono yang beralamat di dusun Rumpuk.



Foto saat peneliti melakukan wawancara bersama pak kepala desa Rumpuk yaitu pak Samin di kediaman beliau pada dusun Rumpuk



Foto saat wawancara bersama pak Suyono salah satu petani di desa Rumpuk yang merupakan anggota Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun di kediaman beliau di dusun Rumpuk



Foto saat wawancara bersama pak Selamet selaku ketua Gabungan Kelompok Tani Podo Rukun desa Rumpuk di kediaman pak Suyono



Foto bersama pak Sukadi selaku kepala bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura kabupaten Lamongan di ruangan kepala PSDM.

LAMPIRAN 4

Akta Badan Hukum Gapoktan Podo Rukun



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0020164.AH.01.07.TAHUN 2015 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PODO RUKUN GAPOKTAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SLAMET	3524161112560002	PENGURUS	KETUA
JOKO	352416200690001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUNARTI	3524166808630001	PENGURUS	BENDAHARA
SUYONO	3524160108650001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2015.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2015

LAMPIRAN 5 Tabel Daftar Anggota Gapoktan Podo Rukun

Kelompok Tani Sri Rejeki

Nama Petani	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Nama Petani	Tempat	Tanggal Lahir	Alamat
					Lahir		
Ali Usman	Lamongan	1950-03-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Rokani	Lamongan	1955-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Aman	Jombang	1966-04-15	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Rokim	Lamongan	1955-01-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Amin	Lamongan	1968-03-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Ruju	Lamongan	1966-03-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Bibit	Lamongan	1963-10-18	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Saim	Lamongan	1958-04-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
H Nur Hidayat	Lamongan	1957-05-10	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Salim	Lamongan	1954-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Harnan	Lamongan	1983-07-15	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Salim	Lamongan	1955-06-06	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Heri Iswanto	Lamongan	1989-02-09	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Samidi	Lamongan	1953-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Isma Il	Lamongan	1984-12-16	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Samsul	Lamongan	1952-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Iswadi	Lamongan	1970-05-07	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sumadi	Lamongan	1940-02-05	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Jaun	Lamongan	1949-07-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sapinah	Lamongan	1940-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Karji	Lamongan	1980-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sarji	Lamongan	1962-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Khoiril	Jombang	1978-09-16	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sawit	Lamongan	1940-01-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Kusnan Marjuki	Lamongan	1950-07-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Siswanto	Lamongan	1973-06-12	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Markam	Lamongan	1959-07-09	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Slamet	Lamongan	1971-07-22	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Masum	Lamongan	1981-01-23	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Subeki	Lamongan	1969-01-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Nurhayati	Lamongan	1976-12-10	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Suhartono	Lamongan	1966-08-30	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Paidi	Lamongan	1944-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sujoko	Lamongan	1958-03-11	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Pujianto	Lamongan	1975-10-23	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sukisno	Lamongan	1969-02-03	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Radi	Lamongan	1961-03-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Suliswati	Lamongan	1976-06-29	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Muzaini	Lamongan	1981-11-28	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sunarti	Lamongan	1963-08-28	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Sudewi Kiptiyah	Lamongan	1993-01-16	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Suparji	Lamongan	1963-02-05	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Hermanto	Lamongan	1989-08-15	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Suprat	Lamongan	1967-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Siswanto	Lamongan	1964-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sutiyo	Lamongan	1969-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Rita Ningsih	Lamongan	1994-12-09	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Sutrisno	Lamongan	1969-09-08	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Iswanto	Lamongan	1982-09-27	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Suwadi	Lamongan	1949-07-02	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Hari Puspito	Lamongan	1986-05-31	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Suwardi	Lamongan	1976-07-10	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Agung Pambudi	Lamongan	1988-02-13	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Suwarno	Lamongan	1977-04-07	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Siswanto	Gresik	1964-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Tampang	Lamongan	1972-05-12	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Andik Cahyono	Lamongan	1996-12-14	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Taram	Lamongan	1961-02-16	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Candra Andika	Surabaya	1994-09-27	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Tari	Lamongan	1969-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01
Budi Wahyuono	Jombang	1981-04-24	Sumur Juwet, RT 01 RW 01	Yasak	Lamongan	1960-02-01	Sumur Juwet, RT 01 RW 01

Kelompok Tani Tani Sejahtera

Nama Petani	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Nama Petani	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat
Abd Kohar	Lamongan	1991-01-14	Rumpuk, RT 04 RW 02	Kuswo	Lamongan	1969-04-06	Rumpuk, RT 06 RW 03
Abdul Munthalib	Lamongan	1979-03-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Latim	Lamongan	1977-06-24	Rumpuk, RT 04 RW 02
Abdul Shomad	Lamongan	1971-04-24	Rumpuk, RT 06 RW 03	Makrup	Lamongan	1977-11-17	Rumpuk, RT 06 RW 03
Akiyat	Lamongan	1974-04-26	Rumpuk, RT 06 RW 03	Malik	Lamongan	1993-01-11	Rumpuk, RT 04 RW 02
Alim	Lamongan	1974-06-03	Rumpuk, RT 04 RW 02	Mardiyah	Lamongan	1969-11-29	Rumpuk, RT 04 RW 02
Andik	Lamongan	1987-03-03	Rumpuk, RT 04 RW 02	Marsidi	Lamongan	1937-06-30	Rumpuk, RT 04 RW 02
Arifin	Lamongan	1979-10-28	Rumpuk, RT 04 RW 02	Matajip	Lamongan	1940-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Basuki	Lamongan	1959-01-01	Rumpuk, RT 05 RW 03	Muhamad Sayuti	Lamongan	1988-01-23	Rumpuk, RT 04 RW 02
Choirul Huda	Lamongan	1980-06-12	Rumpuk, RT 04 RW 02	Muliadi	Lamongan	1977-11-20	Rumpuk, RT 04 RW 02
Darman	Lamongan	1965-05-01	Rumpuk, RT 06 RW 03	Mulyono	Lamongan	1981-05-25	Rumpuk, RT 04 RW 02
Darsono	Lamongan	1963-08-11	Rumpuk, RT 04 RW 02	Mustam	Lamongan	1970-07-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Dasim	Lamongan	1965-01-01	Rumpuk, RT 05 RW 03	Narto	Lamongan	1976-12-04	Rumpuk, RT 05 RW 03
Hartono	Lamongan	1977-01-01	Rumpuk, RT 05 RW 03	Ngali	Lamongan	1958-01-30	Rumpuk, RT 04 RW 02
Iksan	Lamongan	1975-06-15	Rumpuk, RT 04 RW 02	Ngangkat	Lamongan	1947-04-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Ja Un	Lamongan	1973-07-13	Rumpuk, RT 04 RW 02	Ngat	Lamongan	1945-12-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Jaman	Lamongan	1965-01-26	Rumpuk, RT 04 RW 02	Ngateman	Lamongan	1965-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Januri	Lamongan	1974-01-14	Rumpuk, RT 04 RW 02	Nur Alimin	Lamongan	1993-01-27	Rumpuk, RT 04 RW 02
Jari	Lamongan	1975-10-06	Rumpuk, RT 04 RW 02	Padi/Rakini	Lamongan	1978-07-16	Rumpuk, RT 04 RW 02
Jarwo	Lamongan	1980-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Paimin	Lamongan	1945-01-30	Rumpuk, RT 04 RW 02
Jasman	Lamongan	1964-01-01	Rumpuk, RT 05 RW 03	Pantun	Lamongan	1950-01-09	Rumpuk, RT 04 RW 02
Juariyah	Lamongan	1978-10-08	Rumpuk, RT 04 RW 02	Pardi	Lamongan	1946-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Jupri	Lamongan	1990-07-18	Rumpuk, RT 04 RW 02	Parjo	Lamongan	1989-09-08	Rumpuk, RT 04 RW 02
Juwari	Lamongan	1969-09-06	Rumpuk, RT 06 RW 03	Parman	Lamongan	1974-06-02	Rumpuk, RT 06 RW 03
Kairun	Lamongan	1959-06-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Parman	Lamongan	1974-06-02	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kajin	Lamongan	1953-03-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Parno	Lamongan	1960-06-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kandri	Lamongan	1961-08-16	Rumpuk, RT 04 RW 02	Parnoto	Lamongan	1952-07-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kardi	Lamongan	1970-02-28	Rumpuk, RT 04 RW 02	Purnadianto	Lamongan	1933-07-27	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kariono	Gresik	1972-02-01	Rumpuk, RT 06 RW 03	Radi	Lamongan	1970-06-08	Rumpuk, RT 06 RW 03
Karji	Lamongan	1935-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Rantang	Lamongan	1950-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Karni	Lamongan	1953-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Rasan	Lamongan	1967-01-01	Rumpuk, RT 06 RW 03
Kasir	Lamongan	1948-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Rasim	Lamongan	1947-04-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kasnawi	Lamongan	1960-10-11	Rumpuk, RT 04 RW 02	Rastam	Lamongan	1973-11-19	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kawi	Lamongan	1958-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Rateno	Lamongan	1982-05-23	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kohar	Lamongan	1991-02-19	Rumpuk, RT 04 RW 02	Raulah	Lamongan	1955-05-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kowi	Lamongan	1956-02-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Redjo	Lamongan	1949-06-11	Rumpuk, RT 04 RW 02

Kusaini	Lamongan	1972-11-18	Rumpuk, RT 04 RW 02	Riadi	Lamongan	1979-03-21	Rumpuk, RT 04 RW 02
Supangat	Lamongan	1975-10-11	Rumpuk, RT 04 RW 02	Riati	Lamongan	1949-04-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Supi	Lamongan	1963-09-27	Rumpuk, RT 04 RW 02	Ripai	Lamongan	1967-07-02	Rumpuk, RT 06 RW 03
Supo	Lamongan	1925-02-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Romli	Lamongan	1979-04-25	Rumpuk, RT 04 RW 02
Supono	Lamongan	1968-03-15	Rumpuk, RT 06 RW 03	Roselan	Lamongan	1966-03-24	Rumpuk, RT 04 RW 02
Supriadi	Lamongan	1980-05-11	Rumpuk, RT 06 RW 03	Rouf	Lamongan	1985-07-18	Rumpuk, RT 06 RW 03
Supriyadi	Lamongan	1984-04-08	Rumpuk, RT 04 RW 02	Rusmari	Lamongan	1959-05-01	Rumpuk, RT 06 RW 03
Suradi	Lamongan	1971-08-21	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sabar	Lamongan	1964-02-03	Rumpuk, RT 04 RW 02
Surat	Lamongan	1962-02-01	Rumpuk, RT 06 RW 03	Sadi	Lamongan	1935-11-03	Rumpuk, RT 04 RW 02
Sutarji	Lamongan	1966-11-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Saiman	Lamongan	1950-05-01	Rumpuk, RT 06 RW 03
Sutiyo	Lamongan	1971-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sakri	Lamongan	1979-08-08	Rumpuk, RT 06 RW 03
Suto	Lamongan	1965-05-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sali	Lamongan	1951-12-11	Rumpuk, RT 04 RW 02
Sutrisno	Lamongan	1974-08-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sali	Lamongan	1969-09-06	Rumpuk, RT 04 RW 02
Sutrisno	Lamongan	1979-06-07	Rumpuk, RT 04 RW 02	Samsul	Lamongan	1965-01-01	Rumpuk, RT 06 RW 03
Suwadi	Lamongan	1955-02-01	Rumpuk, RT 06 RW 03	Saridjo	Lamongan	1962-03-23	Rumpuk, RT 04 RW 02
Suwadi	Lamongan	1972-01-02	Rumpuk, RT 05 RW 03	Sariman	Lamongan	1970-03-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Suwandi	Lamongan	1963-03-01	Rumpuk, RT 06 RW 03	Satim	Lamongan	1969-06-30	Rumpuk, RT 04 RW 02
Suwardi	Lamongan	1955-08-06	Rumpuk, RT 06 RW 03	Satipah	Lamongan	1971-07-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Suwarno	Lamongan	1994-07-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Satoning	Lamongan	1940-01-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Suwito	Lamongan	1978-05-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sedeq	Lamongan	1949-12-16	Rumpuk, RT 04 RW 02
Suwito	Lamongan	1950-01-11	Rumpuk, RT 04 RW 02	Senan	Lamongan	1964-11-18	Rumpuk, RT 04 RW 02
Suwono	Lamongan	1967-06-04	Rumpuk, RT 05 RW 03	Seneng	Lamongan	1960-02-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Syahril	Lamongan	1991-04-26	Rumpuk, RT 04 RW 02	Seniti	Lamongan	1958-01-24	Rumpuk, RT 06 RW 03
Tamat	Lamongan	1962-02-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sidiq	Lamongan	1940-01-11	Rumpuk, RT 04 RW 02
Tamin	Lamongan	1955-07-02	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sitam	Lamongan	1960-01-11	Rumpuk, RT 06 RW 03
Tarim	Lamongan	1995-06-12	Rumpuk, RT 04 RW 02	Slamet	Lamongan	1960-02-02	Rumpuk, RT 04 RW 02
Tasiyah	Lamongan	1990-05-02	Rumpuk, RT 04 RW 02	Slamet	Lamongan	1956-12-11	Rumpuk, RT 04 RW 02
Toyib	Lamongan	1950-01-07	Rumpuk, RT 04 RW 02	Srianto	Lamongan	1970-09-05	Rumpuk, RT 04 RW 02
Wakir	Lamongan	1973-04-22	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sriati	Lamongan	1971-05-05	Rumpuk, RT 04 RW 02
Warni	Lamongan	1950-12-29	Rumpuk, RT 05 RW 03	Sugeng	Lamongan	1965-05-01	Rumpuk, RT 06 RW 03
Winarti	Lamongan	1987-09-09	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sukadi	Lamongan	1964-01-23	Rumpuk, RT 06 RW 03
Wito	Lamongan	1972-01-02	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sukani	Lamongan	1980-02-11	Rumpuk, RT 04 RW 02
Yali	Lamongan	1978-11-15	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sukar	Lamongan	1963-04-02	Rumpuk, RT 04 RW 02
Yono	Lamongan	1960-06-13	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sukarji	Lamongan	1987-02-24	Rumpuk, RT 04 RW 02
Yono	Lamongan	1966-05-03	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sukemi	Lamongan	1955-06-15	Rumpuk, RT 04 RW 02
Kasiati	Lamongan	1973-05-12	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sumantri	Lamongan	1964-04-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Anang Arifin	Lamongan	1983-06-12	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sumilah	Lamongan	1969-05-22	Rumpuk, RT 06 RW 03
Munaji	Lamongan	1979-11-18	Rumpuk, RT 04 RW 02	Sunoto	Lamongan	1965-02-01	Rumpuk, RT 04 RW 02

Sutrisno	Lamongan	1981-04-12	Rumpuk, RT 04 RW 02	Supadi	Lamongan	1978-07-16	Rumpuk, RT 06 RW 03
Sholeh	Lamongan	1977-01-02	Rumpuk, RT 04 RW 02	Tatik	Lamongan	1961-01-02	Rumpuk, RT 04 RW 02
Sugianto	Lamongan	1981-05-18	Rumpuk, RT 04 RW 02	Tariman	Lamongan	1966-02-01	Rumpuk, RT 04 RW 02
Seswanto	Lamongan	1980-07-01	Rumpuk, RT 06 RW 03	Usman Pribadi	Lamongan	1977-11-02	Rumpuk, RT 06 RW 03
Sutrisman	Lamongan	1977-06-26	Rumpuk, RT 06 RW 03	Anwar	Lamongan	1975-02-07	Rumpuk, RT 04 RW 02
Titik	Lamongan	1978-10-08	Rumpuk, RT 05 RW 03	Is Masruroh	Lamongan	1988-09-15	Rumpuk, RT 04 RW 02
Supadi	Lamongan	1966-02-01	Rumpuk, RT 04 RW 02	Siti Ma Sum	Lamongan	1961-01-20	Rumpuk, RT 04 RW 02

Kelompok Tani Tani Raharjo

Nama Petani	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Nama Petani	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat
Abd Rahman	Lamongan	1958-12-08	Rumpuk, RT 03 RW 02	Padi	Lamongan	1942-01-02	Rumpuk, RT 03 RW 02
Abdul Kamit	Lamongan	1950-02-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Paidi	Lamongan	1952-02-10	Rumpuk, RT 02 RW 01
Ach Ruslan	Lamongan	1982-06-11	Rumpuk, RT 02 RW 01	Paiman	Lamongan	1960-08-18	Rumpuk, RT 02 RW 01
Aliman	Lamongan	1943-07-15	Rumpuk, RT 03 RW 02	Paing	Lamongan	1950-01-01	Rumpuk, RT 02 RW 01
Anang Makruf	Lamongan	1980-09-29	Rumpuk, RT 01 RW 01	Pamuji	Lamongan	1976-08-28	Rumpuk, RT 03 RW 02
Bunari	Lamongan	1972-03-03	Rumpuk, RT 01 RW 01	Parno	Lamongan	1963-03-01	Rumpuk, RT 03 RW 02
Darso	Lamongan	1970-05-08	Rumpuk, RT 01 RW 01	Podo	Lamongan	1931-01-01	Rumpuk, RT 01 RW 01
Daud	Lamongan	1961-01-16	Rumpuk, RT 01 RW 01	Purnadianto	Lamongan	1983-07-27	Rumpuk, RT 03 RW 02
Djalal	Lamongan	1974-07-26	Rumpuk, RT 03 RW 02	Purnomo	Lamongan	1982-08-01	Rumpuk, RT 03 RW 02
Edi	Lamongan	1970-09-01	Rumpuk, RT 01 RW 01	Ragum	Lamongan	1940-04-04	Rumpuk, RT 01 RW 01
Edi Sularso	Lamongan	1988-05-26	Rumpuk, RT 01 RW 01	Rai	Lamongan	1977-01-01	Rumpuk, RT 02 RW 01
Ja I	Lamongan	1961-10-07	Rumpuk, RT 01 RW 01	Rai Prayitno	Lamongan	1964-06-05	Rumpuk, RT 03 RW 02
Juwari	Lamongan	1963-07-07	Rumpuk, RT 02 RW 01	Raji	Lamongan	1966-04-03	Rumpuk, RT 01 RW 01
Kadar	Lamongan	1944-04-01	Rumpuk, RT 03 RW 02	Rasid	Lamongan	1975-07-21	Rumpuk, RT 03 RW 02
Kadianto	Lamongan	1978-06-10	Rumpuk, RT 02 RW 01	Rati	Lamongan	1945-08-15	Rumpuk, RT 03 RW 02
Kalil Budi Hariono	Lamongan	1974-07-15	Rumpuk, RT 02 RW 01	Ratim	Lamongan	1962-02-19	Rumpuk, RT 03 RW 02
Kamal	Lamongan	1962-03-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Rejo	Lamongan	1972-11-02	Rumpuk, RT 03 RW 02
Kandar	Lamongan	1964-07-01	Rumpuk, RT 01 RW 01	Riadi	Lamongan	1975-12-18	Rumpuk, RT 03 RW 02
Karep	Lamongan	1951-02-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Riadi	Lamongan	1953-01-12	Rumpuk, RT 02 RW 01
Karep	Lamongan	1950-01-02	Rumpuk, RT 02 RW 01	Riadin	Lamongan	1945-05-15	Rumpuk, RT 01 RW 01
Karjo	Lamongan	1951-01-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Rodi	Lamongan	1954-01-01	Rumpuk, RT 03 RW 02
Karnawi	Lamongan	1950-05-19	Rumpuk, RT 01 RW 01	Rokib	Lamongan	1971-07-29	Rumpuk, RT 02 RW 01
Karto	Lamongan	1955-05-19	Rumpuk, RT 02 RW 01	Rokim	Lamongan	1940-01-01	Rumpuk, RT 01 RW 01
Kasiadi	Lamongan	1976-04-12	Rumpuk, RT 01 RW 01	Ruji	Lamongan	1949-10-18	Rumpuk, RT 01 RW 01
Kaspar	Lamongan	1960-06-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Saji	Lamongan	1966-01-03	Rumpuk, RT 03 RW 02
Katim	Lamongan	1960-01-03	Rumpuk, RT 02 RW 01	Salekan	Lamongan	1979-07-14	Rumpuk, RT 01 RW 01
Koir	Lamongan	1983-01-12	Rumpuk, RT 02 RW 01	Samin	Lamongan	1965-11-11	Rumpuk, RT 03 RW 02

Komari	Lamongan	1958-02-12	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sariadi	Lamongan	1983-06-03	Rumpuk, RT 01 RW 01
Kukuh	Lamongan	1951-09-08	Rumpuk, RT 03 RW 02	Sarjo	Lamongan	1963-01-01	Rumpuk, RT 03 RW 02
Kusaini	Lamongan	1971-05-24	Rumpuk, RT 02 RW 01	Sarmin	Lamongan	1965-07-18	Rumpuk, RT 03 RW 02
Kusno	Gresik	1969-01-11	Rumpuk, RT 02 RW 01	Satiman	Lamongan	1951-08-03	Rumpuk, RT 03 RW 02
Latim	Lamongan	1977-06-24	Rumpuk, RT 02 RW 01	Satrim	Lamongan	1961-03-06	Rumpuk, RT 01 RW 01
Latip	Lamongan	1967-07-02	Rumpuk, RT 03 RW 02	Selan	Lamongan	1957-07-12	Rumpuk, RT 03 RW 02
Liwon	Lamongan	1967-02-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Setiyo Yulianto	Sidoarjo	1984-07-13	Rumpuk, RT 03 RW 02
Maliki	Lamongan	1964-02-04	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sijan	Lamongan	1962-11-07	Rumpuk, RT 01 RW 01
Malikin	Lamongan	1968-03-21	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sipon	Lamongan	1946-07-02	Rumpuk, RT 01 RW 01
Marfuah	Lamongan	1970-02-12	Rumpuk, RT 01 RW 01	Slamet	Lamongan	1962-03-01	Rumpuk, RT 03 RW 02
Marin	Lamongan	1958-08-05	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sodikin	Lamongan	1964-05-07	Rumpuk, RT 02 RW 01
Masduki	Lamongan	1950-02-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Sriono	Lamongan	1971-01-01	Rumpuk, RT 01 RW 01
Mudrikah	Lamongan	1968-05-14	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sriwoto	Lamongan	1974-06-13	Rumpuk, RT 02 RW 01
Muhammad Syahlan	Lamongan	1964-11-25	Rumpuk, RT 02 RW 01	Subeni	Lamongan	1940-06-06	Rumpuk, RT 03 RW 02
Mulyono	Lamongan	1975-02-12	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sueb	Lamongan	1979-01-08	Rumpuk, RT 01 RW 01
Munadi	Lamongan	1974-01-20	Rumpuk, RT 03 RW 02	Su'Ep Puryono	Lamongan	1983-04-22	Rumpuk, RT 03 RW 02
Mustofa	Lamongan	1973-08-17	Rumpuk, RT 02 RW 01	Sukisno	Lamongan	1979-06-04	Rumpuk, RT 03 RW 02
Ngali	Lamongan	1966-09-19	Rumpuk, RT 03 RW 02	Sukrin	Lamongan	1966-01-01	Rumpuk, RT 03 RW 02
Ngarti	Lamongan	1965-03-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Sukrin	Lamongan	1969-01-11	Rumpuk, RT 01 RW 01
Norasip	Lamongan	1969-02-05	Rumpuk, RT 02 RW 01	Sumardi	Lamongan	1978-01-05	Rumpuk, RT 03 RW 02
Noto	Lamongan	1965-11-06	Rumpuk, RT 02 RW 01	Sunaji	Lamongan	1990-12-09	Rumpuk, RT 03 RW 02
Nurali	Lamongan	1969-12-15	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sunarso	Lamongan	1978-03-05	Rumpuk, RT 03 RW 02
Talam	Lamongan	1945-05-25	Rumpuk, RT 03 RW 02	Supaham	Lamongan	1955-02-06	Rumpuk, RT 01 RW 01
Tamin	Lamongan	1970-04-02	Rumpuk, RT 03 RW 02	Supari	Lamongan	1951-03-01	Rumpuk, RT 02 RW 01
Tanu	Lamongan	1950-05-04	Rumpuk, RT 03 RW 02	Supo	Lamongan	1958-09-07	Rumpuk, RT 02 RW 01
Taram	Lamongan	1900-01-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Supo	Lamongan	1950-02-01	Rumpuk, RT 03 RW 02
Tarju	Lamongan	1962-09-08	Rumpuk, RT 02 RW 01	Supriyadi	Lamongan	1983-12-14	Rumpuk, RT 03 RW 02
Tarman	Lamongan	1958-01-01	Rumpuk, RT 03 RW 02	Surateno	Lamongan	1975-03-19	Rumpuk, RT 03 RW 02
Tawi	Lamongan	1966-05-04	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sutikno	Lamongan	1970-11-18	Rumpuk, RT 03 RW 02
Tikno	Lamongan	1952-02-07	Rumpuk, RT 03 RW 02	Sutikno	Lamongan	1974-06-10	Rumpuk, RT 03 RW 02
Umi Wulandari	Lamongan	1972-12-21	Rumpuk, RT 01 RW 01	Sutiyo	Lamongan	1977-03-12	Rumpuk, RT 02 RW 01
Wadin	Lamongan	1951-01-01	Rumpuk, RT 03 RW 02	Suwaji	Lamongan	1950-04-11	Rumpuk, RT 01 RW 01
Wahyudi	Lamongan	1974-04-07	Rumpuk, RT 02 RW 01	Suwantah	Lamongan	1970-11-07	Rumpuk, RT 02 RW 01
Waras	Lamongan	1965-08-21	Rumpuk, RT 03 RW 02	Suwarto	Lamongan	1975-03-18	Rumpuk, RT 03 RW 02
Wasip	Lamongan	1945-04-01	Rumpuk, RT 02 RW 01	Suwi	Lamongan	1962-05-10	Rumpuk, RT 02 RW 01
Zaenal	Lamongan	1979-01-25	Rumpuk, RT 03 RW 02	Suwono	Lamongan	1960-10-16	Rumpuk, RT 01 RW 01
Tarju	Lamongan	1960-01-01	Rumpuk, RT 03 RW 02	Suyono	Lamongan	1965-08-01	Rumpuk, RT 02 RW 01
Yulianto	Lamongan	1980-04-30	Rumpuk, RT 03 RW 02	Painah	Lamongan	1956-01-01	Rumpuk, RT 03 RW 02

Suliswatti	Lamongan	1981-03-08	Rumpuk, RT 03 RW 02	Rasmadi	Lamongan	1960-01-01	Rumpuk, RT 01 RW 01
Hardi Purniawan	Lamongan	1992-05-07	Rumpuk, RT 03 RW 02	Sukirman	Lamongan	1974-03-19	Rumpuk, RT 02 RW 01
Sutris	Lamongan	1965-01-02	Rumpuk, RT 03 RW 02	Sugiati	Lamongan	1970-01-11	Rumpuk, RT 02 RW 01

Kelompok Tani Murah Rejeki

Nama Petani	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Nama Petani	Tempat	Tanggal Lahir	Alamat
					Lahir		
Abdul Cholik	Tuban	1980-03-30	Tawangsari, RT 03 RW 01	Marjuki	Lamongan	1959-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Achmaji	Malang	1963-02-08	Tawangsari, RT 04 RW 01	Mat Helm	Lamongan	1965-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Agus Purwanto	Lamongan	1988-08-18	tawangsari, RT 01 RW 02	Mateni	Lamongan	1942-03-02	Tawangsari, RT 02 RW 02
Agus Setiawan	Malang	1980-12-05	Tawangsari, RT 03 RW 01	Miyono	Malang	1947-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Ajis	Lamongan	1948-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Muhammad Ananto	Surabaya	1988-12-08	Tawangsari, RT 02 RW 02
Ali	Lamongan	1954-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01	Nawi	Lamongan	1980-06-27	Tawangsari, RT 02 RW 02
Amin	Lamongan	1972-03-15	Tawangsari, RT 04 RW 01	Ngadi	Lamongan	1962-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Arul Pangestu	Lamongan	1975-06-05	Tawangsari, RT 04 RW 01	Ngalim	Lamongan	1953-01-01	Tawangsari, RT 02 RW 02
Asiyah	Lamongan	1949-02-02	Tawangsari, RT 02 RW 02	Ngarjo	Lamongan	1956-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01
Budi Setiawan	Lamongan	1986-09-08	tawangsari, RT 01 RW 02	Ngarso	Lamongan	1969-12-19	Tawangsari, RT 02 RW 02
Cinwati	Lamongan	1972-03-10	Tawangsari, RT 04 RW 01	Nurhayati	Lamongan	1960-10-13	tawangsari, RT 01 RW 02
Dadi	Lamongan	1954-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01	Parli	Gresik	1967-12-31	Tawangsari, RT 04 RW 01
Daham	Lamongan	1964-05-14	tawangsari, RT 01 RW 02	Parman	Lamongan	1954-01-02	tawangsari, RT 01 RW 02
Dakim	Lamongan	1966-03-25	tawangsari, RT 01 RW 02	Parti	Lamongan	1938-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01
Dapet	Lamongan	1964-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Pendi	Gresik	1983-02-10	Tawangsari, RT 02 RW 02
Deddy Arliansyah	Tuban	1982-07-17	Tawangsari, RT 04 RW 01	Ponco	Mojokerto	08/0463	Tawangsari, RT 03 RW 01
Djono	Lamongan	1941-01-02	Tawangsari, RT 04 RW 01	Ponidi	Lamongan	1966-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01
Djuki	Lamongan	1962-11-24	Tawangsari, RT 03 RW 01	Prayitno	Lamongan	1983-02-02	Tawangsari, RT 04 RW 01
Edi Susanto	Gresik	1985-02-06	tawangsari, RT 01 RW 02	Pujianto	Jombang	1971-03-26	Tawangsari, RT 03 RW 01
Hari Riyadi	Lamongan	1973-10-25	Tawangsari, RT 03 RW 01	Pujianto	Lamongan	1971-07-17	Tawangsari, RT 02 RW 02
Hj Karniti	Lamongan	1947-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Purwanto	Lamongan	1971-11-05	Tawangsari, RT 04 RW 01
Jaelan	Gresik	1971-04-19	Tawangsari, RT 04 RW 01	Rachmat	Gresik	1964-01-01	Tawangsari, RT 02 RW 02
Jai	Lamongan	1966-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Radi	Lamongan	1946-01-02	tawangsari, RT 01 RW 02
Jaini	Lamongan	1978-04-22	tawangsari, RT 01 RW 02	Rameli	Lamongan	1967-08-03	tawangsari, RT 01 RW 02
Jamari	Lamongan	1960-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Randim	Lamongan	1946-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Jiin	Lamongan	1969-01-20	Tawangsari, RT 04 RW 01	Rapet	Lamongan	1943-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Joko	Lamongan	1969-08-20	Tawangsari, RT 04 RW 01	Rateno	Lamongan	1972-02-27	Tawangsari, RT 04 RW 01
Juwadi	Lamongan	1956-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Ratim	Lamongan	1969-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Juwadi	Lamongan	1971-09-04	Tawangsari, RT 04 RW 01	Rawan	Lamongan	1948-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Kadi	Gresik	1965-01-21	Tawangsari, RT 04 RW 01	Rawi	Lamongan	1959-01-10	Tawangsari, RT 03 RW 01

Kamdi	Jombang	1972-07-20	Tawangsari, RT 02 RW 02	Rawoh	Lamongan	1945-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Karep	Lamongan	1949-01-01	tawangsari, RT 01 RW 02	Riah	Lamongan	1953-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01
Karep	Lamongan	1954-01-10	Tawangsari, RT 03 RW 01	Ropyan	Lamongan	1964-01-02	Tawangsari, RT 04 RW 01
Karjono	Lamongan	1975-03-30	Tawangsari, RT 04 RW 01	Rumiati	Nganjuk	1960-04-26	Tawangsari, RT 04 RW 01
Karman	Lamongan	1956-01-02	tawangsari, RT 01 RW 02	Rumini	Lamongan	1961-01-02	tawangsari, RT 01 RW 02
Karno	Lamongan	1963-01-02	Tawangsari, RT 02 RW 02	Runti	Lamongan	1970-10-11	Tawangsari, RT 02 RW 02
Kartono	Lamongan	1959-02-02	tawangsari, RT 01 RW 02	Sadi	Gresik	1949-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Kasiati	Lamongan	1958-01-02	Tawangsari, RT 02 RW 02	Sakim	Lamongan	1972-07-25	Tawangsari, RT 02 RW 02
Kastam	Gresik	1962-09-08	Tawangsari, RT 04 RW 01	Samah	Lamongan	1953-03-20	Tawangsari, RT 03 RW 01
Kemat	Lamongan	1973-04-10	Tawangsari, RT 02 RW 02	Saman	Lamongan	1950-01-02	tawangsari, RT 01 RW 02
Kuat	Lamongan	1960-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Saman Sujarwo	Lamongan	1966-06-07	Tawangsari, RT 02 RW 02
Kusman	Lamongan	1972-08-31	Tawangsari, RT 04 RW 01	Samar	Lamongan	1950-01-02	Tawangsari, RT 04 RW 01
Kusnadi	Lamongan	1963-10-05	Tawangsari, RT 04 RW 01	Samiadi	Lamongan	1954-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Langkir	Lamongan	1953-01-10	Tawangsari, RT 03 RW 01	Sampe	Lamongan	1959-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Lani	Lamongan	1961-01-02	tawangsari, RT 01 RW 02	Sampurno	Lamongan	1965-10-20	Tawangsari, RT 04 RW 01
Lati	Lamongan	1948-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01	Sandi Pebriyanto	Lamongan	1992-02-17	Tawangsari, RT 04 RW 01
Madi	Lamongan	1950-01-10	Tawangsari, RT 03 RW 01	Sardi	Lamongan	1958-01-12	Tawangsari, RT 04 RW 01
Mahmudin	Lamongan	1979-07-19	Tawangsari, RT 02 RW 02	Sardin	Lamongan	1953-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01
Manan	Lamongan	1943-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sardjo	Lamongan	1975-04-07	Tawangsari, RT 04 RW 01
Marjono	Lamongan	1938-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01	Sari	Lamongan	1954-02-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Supeno	Lamongan	1969-03-16	Tawangsari, RT 02 RW 02	Sarko	Lamongan	1963-01-01	tawangsari, RT 01 RW 02
Suradi	Lamongan	1968-07-24	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sarmadi	Lamongan	1970-03-19	Tawangsari, RT 03 RW 01
Suraji	Lamongan	1948-06-15	tawangsari, RT 01 RW 02	Sarpi	Lamongan	1968-02-21	tawangsari, RT 01 RW 02
Surateman	Lamongan	1967-07-22	Tawangsari, RT 02 RW 02	Satim	Lamongan	1966-05-04	Tawangsari, RT 02 RW 02
Suratim	Lamongan	1961-07-18	tawangsari, RT 01 RW 02	Sawin	Lamongan	1963-01-02	Tawangsari, RT 02 RW 02
Suwadi	Lamongan	1953-01-02	tawangsari, RT 01 RW 02	Seger	Lamongan	1949-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01
Suwandi	Lamongan	1959-02-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Seger	Lamongan	1940-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01
Suwiji	Lamongan	1970-04-12	Tawangsari, RT 03 RW 01	Selan	Lamongan	1940-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01
Suwito	Lamongan	1960-02-01	tawangsari, RT 01 RW 02	Seman	Lamongan	1936-01-01	tawangsari, RT 01 RW 02
Suwono	Surabaya	1952-06-30	tawangsari, RT 01 RW 02	Senawi	Lamongan	1955-01-01	tawangsari, RT 01 RW 02
Suyitno	Lamongan	1963-06-26	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sewo	Lamongan	1973-03-04	Tawangsari, RT 04 RW 01
Tajib	Lamongan	1967-09-04	Tawangsari, RT 03 RW 01	Sini	Lamongan	1948-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01
Tari	Lamongan	1964-01-02	Tawangsari, RT 02 RW 02	Siono	Mojokerto	1966-06-02	Tawangsari, RT 04 RW 01
Tarianto	Lamongan	1974-08-20	Tawangsari, RT 04 RW 01	Siswanto	Lamongan	1976-07-15	Tawangsari, RT 04 RW 01
Tarso	Lamongan	1965-02-23	Tawangsari, RT 04 RW 01	Siti	Lamongan	1952-01-02	Tawangsari, RT 04 RW 01
Taruwi	Lamongan	1970-09-29	Tawangsari, RT 03 RW 01	Sokran	Lamongan	1960-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01
Tasemin	Lamongan	1965-05-06	tawangsari, RT 01 RW 02	Sri Supadi	Jombang	1982-07-04	Tawangsari, RT 02 RW 02
Tasmijan	Lamongan	1970-11-17	Tawangsari, RT 04 RW 01	Srikat	Lamongan	1970-03-12	Tawangsari, RT 03 RW 01

Tasri	Lamongan	1966-06-10	Tawangsari, RT 02 RW 02	Srimah	Lamongan	1959-05-14	Tawangsari, RT 02 RW 02
Tawar	Lamongan	1959-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01	Sriono	Lamongan	1975-05-13	Tawangsari, RT 02 RW 02
Tawi	Lamongan	1968-05-20	Tawangsari, RT 02 RW 02	Sriono Hadi Sugiarto	Lamongan	1975-05-13	Tawangsari, RT 04 RW 01
Teguh Prayitno	Jombang	1981-10-09	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sudiarto	Mojokerto	1960-01-01	Tawangsari, RT 02 RW 02
Tompo	Lamongan	1945-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sudiono	Lamongan	1988-01-04	Tawangsari, RT 03 RW 01
Toni	Surabaya	1959-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sugianto	Tuban	1983-06-26	Tawangsari, RT 03 RW 01
Toro	Lamongan	1959-06-14	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sugianto	Lamongan	1985-09-10	Tawangsari, RT 02 RW 02
				Sugianto Hadi			
Toto	Lamongan	1945-02-01	Tawangsari, RT 04 RW 0 1	Santoso	Lamongan	1983-07-23	tawangsari, RT 01 RW 02
Triman	Lamongan	1939-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Suhadi	Lamongan	1974-08-06	Tawangsari, RT 02 RW 02
Tubi	Lamongan	1965-01-01	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sukadi	Lamongan	1949-01-10	Tawangsari, RT 03 RW 01
Wadi	Lamongan	1947-01-01	Tawangsari, RT 02 RW 02	Sukadi	Lamongan	1983-02-28	Tawangsari, RT 02 RW 02
Wajib	Gresik	1963-09-20	tawangsari, RT 01 RW 02	Sukeni	Lamongan	1951-01-01	Tawangsari, RT 02 RW 02
Wakhid	Lamongan	1968-04-14	tawangsari, RT 01 RW 02	Sulis	Lamongan	1974-04-12	Tawangsari, RT 04 RW 01
Wantah	Lamongan	1963-01-01	tawangsari, RT 01 RW 02	Sumadi	Gresik	1945-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01
Wantini	Lamongan	1953-10-12	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sumantri	Lamongan	1985-12-20	Tawangsari, RT 04 RW 01
Waras	Surabaya	1949-01-10	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sumejo	Lamongan	1961-07-13	Tawangsari, RT 04 RW 01
Warimin	Lamongan	1974-07-12	Tawangsari, RT 04 RW 01	Sumiati	Lamongan	1976-06-20	Tawangsari, RT 04 RW 01
Warjib	Lamongan	1969-12-20	tawangsari, RT 01 RW 02	Suparto	Lamongan	1970-05-09	tawangsari, RT 01 RW 02
Warjo	Lamongan	1952-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01	Yarman	Lamongan	1969-01-01	Tawangsari, RT 03 RW 01
Wasis	Lamongan	1979-06-17	tawangsari, RT 01 RW 02	Yateman	Lamongan	1974-04-21	Tawangsari, RT 04 RW 01
Watemin	Lamongan	1973-12-01	Tawangsari, RT 02 RW 02	Zainul Musrifin	Lamongan	1988-09-05	Tawangsari, RT 04 RW 01
Wawan Dianto	Lamongan	1985-07-19	tawangsari, RT 01 RW 02	Sulami	Lamongan	1966-12-19	Tawangsari, RT 04 RW 01
Wianto	Lamongan	1970-12-15	Tawangsari, RT 03 RW 01	Tawar Budiono	Lamongan	1975-10-15	Tawangsari, RT 04 RW 01
Andik Setyawan	Lamongan	1989-06-02	Tawangsari, RT 04 RW 01	Tasrun	Lamongan	1939-03-02	Tawangsari, RT 02 RW 02

Sumber: UPT Dinas Pertanian Kecamatan Mantup, Kab. Lamongan, 2019

BRAWIJAYA

LAMPIRAN 6

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ayu Indriadika

Tempat/Tgl Lahir : Lamongan/ 5 Agustus 1996

Umur : 22 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : RT.04 RW.02, Dusun/Desa Kembangbahu

Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan

: Puri Nirwana Sigura-gura Barat Kavling 6,

Alamat sekarang Lowokwaru, Malang

Email : ayuindriadika@gmail.com

Nomor HP : 081230888220

Pendidikan Formal

2002-2008	SDN Kembangbahu 2
2008-2011	SMPN 1 Lamongan
2011-2014	SMAN 2 Lamongan
2015-2019	Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Pengalaman Organisasi

2011-2014	Anggota Harmoni Suara SMADA Lamongan
2012-2013	Anggota Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
2012-2014	Anggota Entrepreneur-Class SMAN 2 Lamongan
2014-2019	Humas dan Admin Komunitas Sosial Ketimbang Ngemis Lamongan
2016	Sekretaris Umum II Sanggar Seni Mahasiswa FIA UB
2017	Sekretaris Umum I Sanggar Seni Mahasiswa FIA UB
2018	Tim IT Quick Count Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Seminar dan Training

8
Diklat Entrepreneur Class (E-Class) di Balai Besar
Pelatihan Peternakan di Batu, Malang
Seminar "Peran Pemuda dalam Menghadapi <i>Proxy War</i> "
oleh Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo
Diklat Anggota "Galaxy" SSM FIA UB
Roadshow XL Future Leaders 4 Universitas Brawijaya
Malang
Diklat TACO 2016 (Training Art Culture Organization)
SSM FIA UB
Diklat TACO 2017 (Training Art Culture Organization)
SSM FIA UB

Kepanitiaan dan Lomba

2016	LO Keroncong Kontingen FIA, Pekan Seni Mahasiswa
	UB
2016	Staf divisi musik Kontingen FIA, FESTA WIJAYA III
2016	Penulis Naskah Kontingen FIA, Gebyar Festival Tari
2016	Co. Dokumentasi Art Study Tour SSM FIA UB
2016	Co. Acara Rainbow Power Art-ministration SSM FIA
-	UB O D D D D D D D D D D D D D D D D D D
2017	Sekretaris Pelaksana TACO SSM FIA UB 2017
2017	Sekretaris Pelaksana Simfoni Senja III di Brawijaya
\\	Edupark (Senaputra)
2017	Steering Comittee Diklat Anggota SSM FIA UB
2017	Penulis Naskah Kontingen FIA, Gebyar Festival Tari
	XXV UB